

**STUDI ANALISIS KETENTUAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM PASAL 102 TENTANG BATAS WAKTU SUAMI
MENGINGKARI ANAK DALAM *LI'AN***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:
NUR 'AINI MAGFIROH
102111051

JURUSAN
AL-AHWALASY-SYAHSIYAH/ HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2015

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.

Jl. Karonsih Selatan VII No. 592 Ngaliyan Semarang

Maria Ana Muryani, S.H., M.H.

Ganesa Raya 299 B Pedurungan Tengah Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Nur Aini Magfiroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:


Nama : Nur 'Aini Magfiroh
NIM : 102111051
Jurusan : Ahwaal asy Syakhshiyah
Judul Skripsi : Studi Analisis KHI Pasal 102 tentang Batas Waktu
Suami Mengingkari Anak dalam *Li'an*

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap maklum
adanya dan kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 21 Desember 2014

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.
NIP. 19590714 198603 1004

Pembimbing II


Maria Ana Muryani, S.H., M.H.
NIP. 19620601 199303 2001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Nur 'Aini Magfiroh
NIM : 102111051
Jurusan : Ahwaal Syakhshiyah
Judul : **Studi Analisis Ketentuan Kompilasi Hukum Islam
Pasal 102 Tentang Batas Waktu Suami Mengingkari
Anak Dalam Li'an.**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup pada tanggal :

21 Januari 2015

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah tahun akademik 2014/2015

Semarang, 28 Januari 2015

Mengetahui

Ketua Sidang

Sekretaris sidang


Achmad Arief Budiman, M.Ag

NIP. 19691031 199503 1 002

Penguji I


Maria Ana Muryani, S.H., M.H.

NIP. 19620601 199303 2001

Penguji II


Drs. Sahidin, M.SP.

NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing I




Anthin Lathifah, M. Ag

NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.

NIP. 19590714 198603 1004


Maria Ana Muryani, S.H., M.H.

NIP. 19620601 199303 2001

ABSTRAK

Menurut istilah syara', *li'an* berarti sumpah seorang suami di muka hakim bahwa ia benar tentang sesuatu yang dituduhkan kepada istrinya perihal perbuatan zina. Jadi, suami menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengemukakan saksi, kemudian keduanya bersumpah atas tuduhan tersebut. Tuduhan itu dapat ditangkis oleh istri dengan jalan bersumpah pula bahwa apa yang dituduhkan suami atas dirinya adalah dusta belaka. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pasal 102 bahwa, Suami yang akan mengingkari anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Dan Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima. *Fuqaha* berbeda pendapat mengenai masalah ini, ada yang menyebutkan bahwa waktu untuk mengingkari anak yaitu saat istri mengandung anak itu dan ada pula yang berpendapat bahwa peningkaran anak dilakukan saat anak itu lahir. Dalam KUH Perdata merinci dengan detail waktu peningkaran anak yang berbeda dengan pendapat *fuqaha* dan ketentuan KHI.

Adapun permasalahan yang akan dibahas penulis yaitu bagaimana ketentuan KHI pasal 102 tentang batas waktu suami mengingkari anak dalam kasus *li'an* dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai batas waktu suami mengingkari anak.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian doktrinal, sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari data primer dan sekunder. Adapun analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Dalam analisis ini hasilnya yaitu ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 102 belum sesuai dengan pendapat *fuqaha* yang berlandaskan hadist, dimana waktu peningkaran anak harus segera dilakukan saat istri hamil atau saat anak itu dilahirkan. Hukum perdata hampir sama ketentuan *fuqaha* dimana suami hanya diberi waktu 1 bulan untuk mengingkari anak yang dilahirkan istri.

Hasil dari penelitan menunjukkan bahwa ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 102 yaitu adanya jeda waktu yang panjang dalam batas waktu suami mengingkari anak sehingga dapat dikatakan pasal 102 KHI tidak memberi ketegasan waktu suami mengajukan gugatan peningkaran anak ke Pengadilan Agama dan pasal 102 KHI tidaklah sesuai dengan pendapat Imam Madzhab yang dianut umat Islam di Indonesia karena dalam pendapat Imam Madzhab menyatakan bahwa peningkaran anak harus segera dilakukan sementara ketentuan KHI pasal 102 memberikan jeda waktu yang sangat panjang dalam pengajuan gugatan peningkaran anak.

MOTTO

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ
مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia Termasuk orang-orang yang berdusta.”¹(QS. an- Nur: 6-7)

¹Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012, hlm. 350

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis, dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak juga berisi tentang pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Desember 2014
Deklarator,

Nur Aini Magfiroh
NIM. 102111051

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang kucintai yang selalu hadir mengisi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan hidup serta bagi mereka yang senantiasa mendukung dan mendoakanku di setiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya buat:

1. Bapak Masrukhin dan Ibu Lasmitah tercinta yang selalu mendoakanku dan menjadi motivator bagiku agar penulis dapat mencapai semua cita-cita penulis. Semoga penulis dapat membahagiakan beliau di dunia dan di akhirat.
2. Kakakku tersayang Mas Arif yang selalu memberi semangat, dan tak lupa adik-adikku tercinta Aisyah, Huda, Kiki dan Hanna yang terus menemaniku dengan segudang canda tawa mereka. Terima kasih banyak all.
3. Untuk Mas Nur Khamid yang selalu memberiku semangat untuk terus belajar dan selalu menemaniku dalam setiap suka dan duka.
4. Untuk Tante Yeti dan Alda yang selalu mempersilahkan penulis melepas penat di rumahnya dan terima kasih atas wejangannya tentang masa depan.
5. Untuk tante kusniah berserta nisa dan dafa yang membantu penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis.
6. Teman-teman senasib seperjuangan Asb 2010, Windi, Uus, Farida, Niswatin, Ninik dan Afni yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama, serta teman-teman semuanya.
7. Kepada guru-guruku yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkanku dengan ilmu, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat.

Semangat dan dorongan dari kalian membuat penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih untuk ketulusan kalian agar penulis terus bersemangat meraih cita-cita penulis. Semoga dengan doa dan ketulusan kalian semua cita-cita penulisan dapat tercapai. Amiin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukrulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Rabbul Izzati, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini masih mendapat ketetapan Iman, Islam, dan Ihsan.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Studi Analisis Ketentuan KHI pasal 102 tentang Batas Waktu Suami Mengingkari Anak dalam Kasus *Li'an*”. Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab bagaimana pandangan hukum Islam dalam menentukan batas waktu suami mengingkari anak dalam kasus *li'an* serta bagaimana hukum positif mengatur batas waktu suami mengingkari anak.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA. dan Ibu Maria Ana Muryani, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
2. Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag, Bapak Drs. Sahidin, M.Si. dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku penguji penulis.
3. Bapak Prof. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. A Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu, kakak adik beserta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi do'a, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 2 Februari 2015
Penulis

Nur Aini Magfiroh
NIM. 102111051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ABSTRAK... ..	iv
HALAMAN MOTTO.. ..	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.	7
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	13
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN <i>LI'AN</i>	
A. KEABSAHAN ANAK	15
1. Hubungan Suami Istri Dalam Perkawinan Yang sah ...	15
2. Asal-Usul Anak	16
3. Keabsahan Anak.. ..	18
B. TINJAUAN UMUM TENTANG <i>LI'AN</i>	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Li'an</i>	24
2. Rukun dan Syarat <i>Li'an</i>	27
3. Tata cara Pelaksanaan <i>Li'an</i>	30
4. Akibat Sumpah <i>Li'an</i> Dari Segi Hukum	32
5. Batas Waktu Suami Mengingkari Anak Dalam <i>Li'an</i> Menurut Para Ulama.	32

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG *LI'AN* DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam	34
B. Ketentuan KHI pasal 102 tentang batas waktu suami mengingkari anak dalam kasus <i>li'an</i>	49

BAB IV ANALISIS KETENTUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 102 TENTANG BATAS WAKTU SUAMI MENGINGKARI ANAK DALAM KASUS *LI'AN*

A. Analisis Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 102 Tentang Batas Waktu Suami Mengingkari Anak Dalam <i>Li'an</i>	53
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 102.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran.. ..	71
C. Penutup.. ..	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.¹ Sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ”
(Surat ar-Rum: 21)²

Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan.³ Manusia cenderung memiliki naluri untuk mendapatkan keturunan yang sah. Keabsahan keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan. Kehidupan

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008, hlm. 80 (KHI Pasal 1)

² Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012, hlm. 406

³ Syaikh Kamil Muhammd Muhammad 'Uwaidah, *Al Jami' fii Fiqhi an-Nisa'*, Terjemahan M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 379

keluarga bahagia umumnya ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa.⁴

Apabila suami membantah atau tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya adalah anaknya, kemudian istri mengakui atau tidak membantahnya maka istri dikenai hukum rajam. Istri dapat membebaskan dirinya dari hukum rajam itu dengan melakukan li'an, yaitu dengan menyatakan bersedia dilaknat Allah setelah mengucapkan persaksian atas diri sendiri empat kali yang dikuatkan dengan sumpah.

Seandainya tuduhan suaminya itu benar, suami akan bebas pula dari hukuman rajam jika ia melakukan li'an pula seperti yang telah dilakukan istrinya. Setelah li'an itu terjadi maka anak tidak dapat dinyatakan sebagai anak suami.⁵ Li'an ada dua macam yaitu:

- a. Suami menuduh istrinya berzina, tetapi ia tidak mempunyai empat orang saksi yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu.
- b. Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya.⁶ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةُ أَنْ
لَعَنَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

⁴ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cetakan ke 2, Jakarta, 1984-1985, hlm. 64

⁵ *Ibid*, hlm.176

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan. Moh Tholib, *Fikih Sunnah*, Bandung: al Ma'arif, 1983, hlm. 129

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya Dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia termasuk orang-orang yang berdusta."⁷ (QS. an-Nur: 6-7)

Ayat ini turun berkenaan dengan Hilal ibn Umayyah yang menuduh di hadapan Nabi saw. bahwa istrinya telah menyeleweng. Nabi saw. menuntut darinya empat orang saksi atau dicambuk. Ia mempertanyakan hal tersebut dan menyatakan ketentuan itu tidak mungkin dapat dipenuhi oleh seorang suami.⁸

Setelah Rasulullah saw. menerima ayat tentang li'an, beliau menemui istri Hilal. Hilal datang dan bersumpah, Rasul bersabda: Allah tahu bahwa salah seorang diantara kalian ada yang berdusta, apakah di antara kalian ada yang mau bertaubat? kemudian istri Hilal pun bersumpah. Rasulullah saw. bersabda:

أَبْصِرْ وَهَذَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغِ الْأَلْيَتَيْنِ، خَدَّلَجِ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لَشَرِّكَ بْنِ سَحْمَاءَ. فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ لَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ.⁹

Artinya: "Perhatikanlah oleh kalian semua, jika kelak bayi yang dilahirkannya memiliki kelopak mata yang menghitam, pantatnya besar dan kedua betisnya padat, maka bayi itu adalah anak Syurakh bin Sahma. "Ternyata ucapan Nabi saw. benar. Dan ketika mengetahuinya, Nabi saw. berkata, "Kalau tidak ada li'an yang telah ditetapkan oleh kitab Allah saat itu,

⁷ Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, op. cit, hlm. 350.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 483.

⁹ Dikutip dari Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa'*, Terjemahan. Asep Sobari, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom, 2007, hlm.799.

maka aku akan membuat perhitungan dengannya.” (HR. Bukhari, AbuDawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Adapun waktu yang boleh dilakukan pengingkaran anak menjadi perselisihan pendapat para fuqaha, yang mana waktu pengingkaran anak yang dilakukan suami itu sangatlah berperan penting dalam kasus li'an karena waktu mengingkari anak menjadikan sah atau tidaknya perbuatan li'an.

Imam Malik mensyaratkan apabila suami tidak mengingkari kandungan dalam masa kehamilan, maka ia tidak boleh mengingkarinya sesudah kelahiran dengan li'an. Imam Syafi'i berpendapat apabila suami mengetahui kehamilan istrinya, kemudian hakim memberi kesempatan kepadanya untuk berli'an, tetapi ia tidak mau berli'an maka tidak ada hak baginya untuk mengingkari kandungan sesudah kelahiran. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, suami tidak boleh mengingkari anak sampai istri melahirkan.¹⁰

Imam Malik dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya beralasan dengan riwayat-riwayat yang mutawatir dari hadis Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Anas r.a. dan Sahl bin Sa'ad berikut ini:

أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ حَكَمَ بِاللَّعَانِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى صِفَةٍ كَذَا فَمَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Saw. ketika memutuskan perkara li'an di antara dua orang yang saling berli'an, beliau bersabda: “Jika istri melahirkan kandungan dengan ciri-ciri demikian maka aku

¹⁰ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Dar al- Jiil, 1989. Terjemahan Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 675.

berpendapat bahwa ia suami benar terhadap tuduhannya.” (HR.Ibnu-Majah).¹¹

Jumhur fuqaha mengemukakan bahwa syara’ telah menggantungkan berbagai macam hukum terhadap timbulnya kandungan seperti nafkah, iddah, dan larangan menyetubuhi. Maka sudah seharusnya pula masalah li’an diqiyaskan demikian.¹²

Sementara itu batasan waktu suami mengingkari anak dalam KHI sangatlah jauh berbeda dengan pendapat para imam mazhab. Di mana dalam KHI pasal 102 diterangkan bahwa “Suami yang akan mengingkari anak yang dilahirkan istrinya, mengajukan gugatan kepada pengadilan agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya dan 360 hari sesudah putusnya perkawinan, setelah masa itu suami tidak bisa mengajukan gugatan anak.”

Jika pada pendapat fuqaha waktu mengingkari anak itu harus dilakukan saat istri mengandung atau saat istri melahirkan yang mana tidak ada waktu untuk seorang ayah mengakui anak itu sebagai anaknya sementara dalam KHI pasal 102 diberi jeda waktu 6 bulan setelah kelahiran anak dan satu tahun setelah perceraian, di mana pada jeda waktu itu suami melakukan tugasnya masih dalam kategori melakukan kewajiban sebagai seorang ayah sebelum dia dapat mengajukan gugatan pengingkaran anak ke pengadilan agama.

¹¹ *Ibid*, hlm. 676

¹² *Ibid*.

Dalam pasal 256 KUH Perdata juga merinci waktu pengingkaran anak dilakukan dalam waktu satu bulan jika ia diam di tempat kelahiran anak, dalam waktu dua bulan setelah pulang kembalinya jika ia berada dalam keadaan tak hadir, dalam waktu dua bulan setelah tipu muslihat diketahuinya, jika kelahiran anak itu disembunyikan darinya.

Untuk peraturan dalam KUH Perdata tentang batas waktu suami mengingkari anak ini sangat berbeda dengan pendapat fuqaha dan KHI, padahal di negara Indonesia ini mayoritas beragama Islam, seharusnya pasal yang terkait dengan batas waktu pengingkaran anak yang dilakukan suami haruslah sesuai menurut dengan pendapat Imam Madzhab yang sesuai al-Qur'an dan hadist.

Dari penjelasan itu penulis tergerak untuk meneliti lebih detail berkaitan dengan batas waktu suami dapat melakukan pengingkaran anak yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul **“STUDI ANALISIS KHI PASAL 102 TENTANG BATAS WAKTU SUAMI MENGINGKARI ANAK DALAM LI'AN”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan KHI pasal 102 tentang batas waktu suami mengingkari anak dalam li'an?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ketentuan KHI pasal 102 tentang batas waktu suami mengingkari anak dalam li'an?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan KHI pasal 102 tentang batas waktu suami mengingkari anak dalam li'an.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap KHI pasal 102 tentang batas waktu suami mengingkari anak dalam li'an.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian tentang pengingkaran anak atau yang lebih dikenal dengan li'an memang sudah banyak ditulis. Untuk menghindari plagiasi maka penulis akan mencantumkan tinjauan pustaka skripsi terdahulu yang bertemakan li'an yaitu:

Skripsi yang berjudul "Analisis Putusan MA Nomor: 163K/AG/2011 Mengenai Penyangkalan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010" oleh Agung Nugroho, nim 8111409092. Skripsi ini membahas tentang MA menjatuhkan putusan nomor 163K/AG/2011, putusan tersebut mengabulkan gugatan penyangkalan anak yang dilakukan oleh suami yang

menguatkan putusan PA Purwokerto nomor: 1537/pdt-G/2009/PA. Pwt dan membatalkan putusan PTA Semarang nomor: 185/pdt-G/2010/PTA. Smg yang memenangkan isteri. Majelis hakim MA mengabulkan gugatan penyangkalan anak yang diajukan suami dengan pertimbangan pada substansi hukumnya walau secara normatif tekstual pengajuannya melebihi 180 hari sebagaimana diatur dalam pasal 102 KHI. Pertimbangan tersebut dikuatkan dengan tes DNA serta dikuatkan dengan li'an sesuai pasal 127 KHI. Jadi dalam skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa dengan putusan MA nomor: 163K/AG/2011 telah merubah status hukum anak dan telah memutus hubungan hukum keperdataan antara anak dan ayahnya, sehingga tanggung jawab anak dilimpahkan kepada ibunya. Sedangkan anak dengan ayah biologisnya masih mempunyai hubungan keperdataan namun sebatas hadhanah saja, sesuai dengan pasal 43 UUP yang telah diubah berdasarkan putusan MK nomor: 46/PUU-VIII/2010.¹³

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Yang dili'an” oleh Nani Nursamsiyah, Nim. 052111032. Skripsi ini membahas tentang kewajiban suami terhadap istri yang dili'an menurut Abu Hanifah, di mana Abu Hanifah berpendapat bahwa perpisahan karena li'an itu bukan dihukumi

¹³ Agung Nugroho, 8111409092, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, *Analisis Putusan MA Nomor: 163K/AG/2011 mengenai Penyangkalan Anak yang Lahir dalam Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010*, dipublikasikan.

fasakh melainkan talak ba'in di mana wanita yang dili'an tidak haram dinikahi untuk selama-lamanya dan istri berhak mendapatkan nafkah.¹⁴

Dan tesis yang berjudul “Penyangkalan Anak dan Akibatnya (Studi Kasus Perkara Nomor: 0951/pdt-G/2007/PA.Sm)” oleh Aris Andarwati, Nim. B4B007022. Tesis ini membahas tentang akibat hukum terhadap perkara penyangkalan anak yang telah diputus dengan putusan pengadilan agama nomor: 0951/pdt-G/2007/PA. Smg. Dengan dikabulkannya oleh PA Semarang terhadap permohonan penyangkalan anak tersebut maka putuslah hubungan perdata anak dengan ayahnya dan anak tersebut menjadi anak dari ibunya dan bukan anak ayah.¹⁵

Di samping itu dalam penulisan ini, penulis merujuk pada kajian li'an dan pengingkaran anak juga dibahas dalam kitab-kitab fiqh, contohnya kitab Bidayatul Mujtahid yang membahas tentang wajibnya li'an, macam-macam tuduhan yang mewajibkan li'an dan syarat-syaratnya, sifat-sifat (keadaan-keadaan) suami istri yang saling berli'an. Cara pengucapan li'an, hukum penolakan salah seorang atau kedua suami istri dan tentang rujuknya suami, kemudian akibat-akibat li'an.

KUH Perdata juga mengatur tentang pengingkaran anak, dijelaskan pula ketentuan batas waktu suami mengingkari anak dengan lebih

¹⁴ Nani Nursamsiyah, 052111032, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2011, *Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Kewajiban Suami Pada Istri yang dili'an*, dipublikasikan.

¹⁵ Aris Andarwati, B4B007022, Magister Kenotariatan Progam Pasca Sarjana UNDIP, *Penyangkalan Anak dan Akibatnya (Studi Kasus Perkara Nomor: 0951/pdt-G/2007/PA. Sm)*, dipublikasikan.

terperinci. Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa suami dapat mengingkari anak jika anak yang dilahirkan itu kurang dari 180 hari sejak perkawinan terjadi dan disebutkan pula batas waktu suami mengingkari anak dalam keadaan apapun.

Namun dalam hal ini, penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu. Karena dalam penulisan ini, penulis memfokuskan kepada ketentuan KHI pasal 102 tentang batas waktu suami mengingkari anak dalam kasus li'an.

E. METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan¹⁶ cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah. Agar pembahasan ini menjadi terarah, sistematis dan obyektif. Maka digunakan metode ilmiah, di dalam membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dan Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum dari sudut tujuannya dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal atau *legal research* adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menekankan pada langkah-langkah

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ardi Offset, 1990, hlm. 4.

spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif.¹⁷ Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris atau non doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian ini menekankan pada langkah-langkah observasi dan analisis empiris – kuantitatif.¹⁸

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal (yuridis normatif) karena mengkaji dan menganalisis ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 102 ditinjau dari perspektif hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

- a. Bahan hukum primer. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁹ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu kompilasi hukum Islam pasal 102.
- b. Bahan hukum sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51.
Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 10.

¹⁸ Soejono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 51.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Op. cit.*, hlm. 13.
Lihat juga Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 31.

mengenai bahan hukum primer, seperti kitab Bidayyatul buku-buku, jurnal, dan skripsi.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumen. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, pengertian studi dokumen bagi penelitian hukum adalah studi terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier.²¹ Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan mengkategorisasikan berdasarkan bahan-bahan hukumnya.

4. Metode Analisis Data

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Menurut Soejono dan Abdurrahman penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²²

Penerapan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Op. cit.*, hlm. 13. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 32.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 68.

²² Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 23.

batasan waktu suami dalam mengingkari anak pada lembaga li'an yang dirumuskan KHI pasal 102.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini terbagi menjadi lima (5) bab yang akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab. Antara bab satu dengan bab lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjabarkan mengenai permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang anak dan li'an. Merupakan landasan teori untuk bab-bab berikutnya. hal yang penulis kemukakan meliputi definisi anak, kedudukan anak, hak-hak anak, pengertian li'an dan dasar hukumnya, syarat dan rukun li'an, lalu sebab dan akibat li'an.

Bab ketiga berisi ketentuan khi pasal 102 tentang batas waktu suami mengingkari anak dalam kasus li'an. dalam bab ini penulis membahas secara khusus mengenai ketentuan khi pasal 102 tentang batas waktu suami mengingkari anak dalam kasus li'an.

Bab keempat berisi analisis ketentuan khi pasal 102 tentang batas waktu suami mengingkari anak dalam kasus li'an. dalam bab ini merupakan inti skripsi, dimana penulis akan menganalisis ketentuan khi pasal 102 tentang batas waktu suami mengingkari anak dalam kasus li'an

dengan menggunakan sudut pandang hukum islam dan menganalisis khi pasal 102 tentang batas waktu suami mengingkari anak dalam kasus li'an menurut hukum perdata.

bab kelima yaitu penutup, bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi. Pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan dan beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN LI'AN

A. Tinjauan Umum tentang Keabsahan Anak

1. Hubungan Suami Istri dalam Perkawinan yang Sah

Salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh agama Islam dengan mensyari'atkan perkawinan ialah bersih keturunannya, jelas bapaknya dengan perkawinan ibunya.¹ Perkawinan yang sah, maksudnya perkawinan yang sudah resmi antara seorang wanita dengan seorang pria. Maka kalau nantinya wanita itu hamil lalu melahirkan anak, jelaslah hamilnya dari suaminya itu dan keturunan anak yang lahir itu bersambung ke atas dengan keturunan ayahnya itu. Dan dalam hal ini tidaklah perlu supaya sang ayah tadi melakukan pengakuan atas anaknya itu, bahwa hamilnya benar-benar dari suaminya.²

Islam menetapkan adanya hubungan keturunan itu dengan syarat adanya perkawinan yang sah itu saja dan tidak tergantung lagi kepada bukti yang lain. Karena sebenarnya sebab terjadinya hamil ialah adanya hubungan antara pria dan wanita, yang kemudian menyebabkan terjadinya anak. Dan hubungan itu merupakan suatu hal yang tersembunyi, sedangkan hukum tidak terikat pada perkara yang tersembunyi. Jadi, sebagai ganti membuktikan hubungan itu, ditetapkanlah adanya aqad nikah yang sah.

Yang menyebabkan seorang istri terbatas hanya mengadakan hubungan dengan suaminya dan juga tidak boleh memberi kesempatan kepada orang lain untuk

¹ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cetakan ke 2, Jakarta, 1984-1985, hlm. 172.

² Zakaria Ahmad al Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, Terjemahan. Chadidjah Nasution, Hukum Anak-Anak dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 14.

mengadakan hubungan dengannya dan juga tidak boleh lagi orang lain berdua-duaan dengannya di tempat yang sepi, yang menimbulkan perasaan curiga.³

Syarat-syarat perkawinan yang menyebabkan sahnya hubungan keturunan yaitu:

- a. Hamilnya istri dari suaminya itu merupakan hal yang mungkin. Misalnya suami sudah dewasa, sebaliknya kalau suami masih kecil itu tidak masuk akal bahwa dia dapat menyebabkan istri hamil. Maka anak yang lahir tidak diakui ada hubungannya dengan suami ibunya, laki-laki yang masih kecil itu.
- b. Bahwa sang istri melahirkan anaknya, sedikitnya berlalu enam bulan dari tanggal dilangsungkannya aqad nikah. Karena masa enam bulan itu adalah masa hamil yang paling sedikit.
- c. Istri melahirkan anaknya dalam masa kurang dari dua tahun, dihitung dari tanggal perpisahannya dengan suaminya. Jadi kalau wanita melahirkan anaknya setelah berlalu dua tahun atau lebih, dari tanggal perpisahannya dengan suaminya baik berpisah karena thalaq bain atau suaminya meninggal. Maka anak yang dilahirkannya itu jelas tidak diakui hubungan keturunannya dengan suaminya.⁴

2. Asal Usul Anak

Anak manusia itu berasal dari *thin* (saripati tanah) yang berubah menjadi *nuthfah* (cairan) nampaknya istilah *nuthfah* menunjukkan *spermatozoa* pada pria dan *ovum* pada wanita.⁵ Seperti firman Allah SWT:

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid*, hlm. 16-17

⁵ Musthofa Rahman, *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Atmaja, 2003, hlm. 40

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٥﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا
النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أُنشَأْنَاهُ
خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٧﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.” (QS. Al-Mu’minun)⁶

Ketika saripati tanah yang menjadi sperma laki-laki tersimpan dalam rahim wanita bertemu dengan ovum, maka terjadilah konsepsi yang membentuk calon anak manusia dalam rahim wanita sebagai tanda awal kehamilan. Pada konsepsi itu menurut para ahli kedokteran, hanya satu sel mani yang berhasil membuahi satu sel telur. Setelah masa konsepsi, *nuthfah* (balstokist) itu menjadi ‘*alaqah* (morula) sampai pada akhir bulan pertama yang selanjutnya berubah menjadi *mudhghah* (embrio) sampai akhir bulan kedua. Pada awal bulan ketiga organ tubuhnya sudah terbentuk semua, sehingga wujud kemanusiaannya sudah nampak jelas. Pada umur empat bulan Allah meniupkan ruh di dalam diri janin dalam rahim tersebut.⁷

⁶ Kemenag RI, *Al Qur'an dan Tarjamahannya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012, hlm.

⁷ Musthofa Rahman, *op. cit*, hlm. 41

Nuthfah adalah hasil pertemuan antara satu sel atau lebih dari sperma laki-laki yang memancar dan ovum atau sel telur dirahim perempuan.

‘*Alaqah* sebagai segumpal darah, tetapi penelitian ilmiah yang dilakukan cenderung mengartikan *al-‘alaq* sebagai sesuatu yang bergantung atau menempel didinding rahim.

Mudghah yang mempunyai arti segumpal daging ini merupakan fase yang mana berbentuk lengkung, dengan penampakan gelembung-gelembung serta alur-alur.

Dan sejak awal atau terjadi konsepsi sperma dengan ovum sudah mulai terwujud kehidupan seorang manusia dalam rahim. Perkembangan janin sudah lengkap dalam rahim sampai bulan ke tujuh itu sudah sempurna, mungkin apabila lahir disebut dengan bayi. Pada bulan ke delapan dan sembilan, organ janin semakin kuat dan siap untuk hidup di dunia. Maka apabila ada usia kandungan yang hanya enam bulan itu merupakan hal yang sangat rasional karena janin yang berusia enam bulan itu sudah memungkinkan untuk lahir di dunia sebagai bayi yang sehat meski memerlukan perawatan yang intensif.⁸

Para ulama sepakat bahwa masa hamil minimum adalah enam bulan dan berbeda pendapat tentang masa hamil maximum. Menurut Syi'ah ialah 9 atau 10 bulan, menurut Hanafi dua tahun, menurut Syafi'i empat tahun, sedangkan menurut Maliki 5 tahun. Persoalan ini timbul jika seorang suami mentalak istrinya. bilamana istri melahirkan anak, apakah anak itu anak bekas suami atau bukan. Sepakat para ulama' mengatakan bahwa apabila anak itu lahir paling lama setelah sembilan atau sepuluh bulan dihitung sejak jatuhnya talak, maka anak itu adalah anak bekas suaminya. Berbeda dengan pendapat ulama yang mengatakan jika anak itu lahir lewat dari 10 bulan sejak jatuhnya talak, seperti yang telah disebutkan tadi.⁹

3. Keabsahan Anak

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya.¹⁰ Keabsahan seorang anak itu didasarkan saat terjadinya konsepsi (pembuahan) janin dalam rahim seorang ibu yang mengandungnya,

⁸ *Ibid.* hlm. 42

⁹ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 175.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, hlm. 177.

di mana anak yang lahir dapat dikategorikan anak sah atau anak luar kawin. Berikut penjelasannya adalah:

a. Anak sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam KUH Perdata Pasal 250 dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak memakai nama di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan dan diperinci, apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu pasal 99 yang menyebutkan bahwa,

Anak yang sah adalah:

- (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- (2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹¹

Untuk pasal 99 huruf b, mengandung pembaharuan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung, yaitu proses ovulasi rekayasa di luar rahim melalui tabung yang disiapkan untuk itu, kemudian dimasukkan lagi ke dalam rahim istri tersebut. Jadi, tetap dibatasi antara suami istri yang sah.¹²

Sedangkan rumusan anak sah poin (a) dalam KHI yang sama persis dengan rumusan Undang-Undang Perkawinan dapat ditarik dua pengertian, yaitu anak sah

¹¹ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm. 31, (KHI pasal 99).

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 222.

karena dilahirkan dalam perkawinan dan anak sah karena dilahirkan sebagai “akibat” perkawinan.¹³

(1) Anak sah akibat perkawinan

Pembatasan anak sah yang didasarkan pada akibat perkawinan seperti ini cukup jelas. Maksudnya, anak yang dilahirkan oleh ibunya itu memang benar-benar dibenihkan oleh suaminya setelah terikat dalam perkawinan yang sah. Sehingga anak tersebut merupakan akibat pernikahannya. Dasar keabsahan anak ini adalah bahwa seorang anak merupakan akibat perkawinan. Anak yang menjadi akibat suatu perkawinan adalah anak yang sejak awal (masa konsepsinya) sebagai janin dalam kandungn ibunya terjadi setelah ayah dan ibunya terikat perkawinan.¹⁴

Anak yang lahir setelah putusnya ikatan perkawinan meskipun terjadi di luar perkawinan namun konsepsi janinnya terjadi dalam ikatan perkawinan tersebut. Maka, anak ini pun dihukumi sebagai anak yang sah. Indikator keabsahan anak yang merupakan akibat perkawinan adalah bagaimana anak sah yang sesuai dengan al-Qur'an (yakni berada dalam kandungan selama enam bulan sejak perkawinanya), meskipun lahir di luar perkawinan.¹⁵

(2) Anak sah karena lahir dalam perkawinan

Pengertian anak sah yang hanya didasarkan pada saat kelahirannya dalam ikatan perkawinan berimplikasi pada semua anak yang lahir dalam perkawinan dinyatakan sebagai anak sah. Maka batasan anak sah yang

¹³ Musthofa Rahman, *op. cit.*, hlm. 55.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 56

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 57

berlaku bagi anak yang konsepsinya dalam kandungan terjadi baik sebelum dan sesudah perkawinan ayah dan ibunya. Artinya, menurut ketentuan tersebut, anak yang masa konsepsinya terjadi sebelum perkawinan tapi setelah diketahui hamil, ayah dan ibunya melakukan perkawinan sehingga anak itu terlahir dalam perkawinan, sehingga anaknya dikategorikan sebagai anak sah.¹⁶

Dalam KUH Perdata pasal 250 atau Burgerlijk Wetboek (BW) menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.” Dalam rumusan tersebut menjelaskan bahwa meskipun anak itu dilahirkan dalam waktu yang sangat pendek dari perkawinan ayah dan ibunya tetap saja diberi predikat sebagai anak sah. Asal dilahirkan dalam perkawinan yang sah, seorang anak disebut anak sah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa rumusan anak sah dalam hukum perdata berpengaruh kuat terhadap konsep anak sah dalam KHI.¹⁷

Batasan anak sah yang hanya didasarkan pada kelahiran hanya didasarkan pada kelahirannya dalam perkawinan membawa implikasi bahwa anak yang masa konsepsinya janin itu terjadi akibat perzinahan yang dilakukan ibunya dinyatakan sebagai anak sah karena lahir dalam perkawinan.¹⁸

Dari kalangan empat Madzhab, Imam Abu Hanifah menegaskan sahnya status anak zina disebabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 59

¹⁸ *Ibid.*

menikah sebelum anak lahir. Dalam Madzhab Syafi'i ada dua pendapat, pendapat pertama bahwa nasab anak zina tetap kepada ibunya bukan kepada bapak biologisnya walaupun keduanya sudah menikah sebelum anak lahir. Pendapat kedua, status anak zina dalam kasus ini dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila anak ini lahir di atas enam bulan pasca pernikahan kecuali apabila suami melakukan ikrar pengakuan anak. Menurut Madzhab Hanbali dan Maliki menyebutkan bahwa tidak sah menikahi wanita hamil dan status anaknya tetap anak zina atau bukan anak sah.¹⁹

b. Anak di luar nikah

Menurut Abdul Manan dalam buku *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, menyebutkan bahwa Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.²⁰ Banyak faktor penyebab terjadinya anak luar nikah, diantaranya adalah:

- (1) Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 2007, Terjemahan. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam* 10, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 148.

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 81.

- (2) Anak yang lahir dari seorang wanita kelahirannya diketahui dan dikehendaki salah satu ibu atau bapaknya, hanya saja salah satunya orang tua masih terikat dengan perkawinan yang lain.
- (3) Anak yang dilahirkan dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.
- (4) Anak yang lahir dari seorang wanita yang dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang diahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria bukan suaminya.
- (5) Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suami sebagai anak yang sah.
- (6) Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang dipeluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup tetapi dilakukan juga, kemudian dia kawin lagi dan melahirkan anak.
- (7) Anak yang lahir dari seorang wanita padahal Negara memberlakukan larangan kawin.
- (8) Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama.
- (9) Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaanya, serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.²¹

²¹ *Ibid*, hlm. 82

B. Tinjauan Umum tentang Li'an

1. Pengertian Li'an dan Dasar Hukumnya

Li'an menurut bahasa artinya la'nat, termasuk dosa sebab salah satu dari suami istri berbuat dusta, sedangkan menurut istilah li'an adalah suami menuduh istrinya berzina, ia bersumpah menerima la'nat apabila ia berbohong.²² Istilah li'an diambil dari kata la'n (berarti: laknat atau kutukan), karena suami pada sumpah yang kelima mengucapkan, "Laknat Allah ditimpakan kepadanya jika dia termasuk pendusta." Kata ini juga disebut li'an, ilti'an dan mula'anah.²³

Menurut istilah syara', li'an berarti sumpah seorang suami di muka hakim bahwa ia benar tentang sesuatu yang dituduhkan kepada istrinya perihal perbuatan zina. Jadi, suami menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengemukakan saksi, kemudian keduanya bersumpah atas tuduhan tersebut. Tuduhan itu dapat ditangkis oleh istri dengan jalan bersumpah pula bahwa apa yang dituduhkan suami atas dirinya adalah dusta belaka.²⁴

Ada beberapa definisi li'an yang dikemukakan ulama fikih. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan "Persaksian kuat dari pihak suami bahwa istrinya berbuat zina yang diungkapkan dengan sumpah yang diikuti dengan lafal li'an, yang ditanggapi dengan kemarahan dari pihak istri." Bagi ulama Mazhab Hanbali, li'an juga berlaku dalam nikah fasid (rusak, karena kekurangan

²² Moh. Rifa', Moh. Zuhri dan Salomo, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, hlm. 329.

²³ Muhammad bin ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Terjemahan. Ali Nur Medan, Darwis, Ghana'im, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013, hlm. 83.

²⁴ Slamet Abidin dan Aminuddi, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 97.

salah satu syarat nikah). Bagi ulama Mazhab Hanafi, li'an tidak sah dalam nikah fasid.²⁵

Ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan “Sumpah suami yang muslim dan cakap bertindak hukum bahwa ia melihat istrinya berzina atau ia mengingkari kehamilan istrinya sebagai akibat hasil pergaulannya dengan istrinya itu, kemudian istri bersumpah bahwa tuduhan itu tidak benar sebanyak empat kali di hadapan hakim, baik nikah suami istri itu nikah sah maupun nikah fasid.” Bagi mereka, li'an yang dilakukan suami yang kafir, anak kecil, orang gila, dan orang mabuk tidak sah.²⁶

Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan “Kalimat tertentu yang dijadikan alasan untuk menuduh istri berbuat zina dan mempermalukannya atau mengingkari kehamilan istri sebagai hasil pergaulannya dengan istri itu.”²⁷

Dalam undang-undang hukum perdata di Indonesia tidaklah dikemukakan adanya li'an namun disebut dengan pengingkaran atau penyangkalan anak yang dilakukan oleh suami terhadap anak yang dilahirkan istri. Adapun prosesi li'an itu secara menyeluruh adalah sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nur Ayat 6 dan 7:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةُ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ
الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

²⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, hlm.1009

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta”²⁸ (QS. An-Nur: 6-7)

Kemudian berlanjut dengan an-Nur Ayat 8 dan 9:

وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٨﴾
وَالْخُمُسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.”²⁹ (QS. An-Nur: 8-9)

حَدَّثَنَا ابْنُ عُمرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَنْ بَيْنِ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، فَا تَنَفَّى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْحَقَّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

Artinya: “Hadits Ibn Umar r.a., bahwasannya Nabi s.a.w. menyumpah li'an seorang suami dengan isterinya lalu suaminya tidak mengakui anaknya maka beliau memisahkan antara suami istri itu dan memberikan anak itu kepada ibunya.”³⁰

Al-Bukhari mentakhrijkan hadist ini dalam “Kitab Talak” bab tentang anak itu diberikan kepada wanita yang bersumpah li'an.³¹ Seorang suami yang melihat laki-laki lain yang keluar dari tempat istrinya atau duduk bersama jangan cepat-cepat menuduhnya berzina, sebab tuduhan harus disertai bukti-bukti yang nyata. Seorang suami yang melihat istrinya mengandung jangan cepat-cepat menuduhnya berzina. Sebab anak yang dikandung mungkin juga hasil hubungan dengan dirinya (yang

²⁸ Kemenag RI, *Al Qur'an dan Tarjamahannya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012, hlm. 350.

²⁹ *Ibid*, hlm.342

³⁰ Dikutip dari Terjemahan. Muslich Shabir, *al-Lu'Lu' Wal Marjan*, Semarang: Al-Ridha, 1993, hlm. 307.

³¹ *Ibid*, hlm. 307.

belum dirasakan), kecuali kalau sudah yakin betul bahwa istrinya berzina. Dalam menuduh istri berzina tetapi ia tidak mempunyai bukti yang nyata maka ia harus bersumpah li'an.³²

2. Syarat dan Rukun Li'an

Suatu perbuatan dapat dihukumi li'an bilamana perbuatan tersebut memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan dalam li'an. adapun syarat li'an dibagi ulama menjadi dua bentuk, yaitu syarat wajibnya li'an dan syarat sahnya melakukan li'an. Syarat wajib li'an menurut ulama Mazhab Hanafi ada tiga yaitu:³³

- a. Adanya ikatan perkawinan dengan seorang perempuan, meskipun belum sempat disetubuhi. Begitu juga istri dalam masa iddah talak raj'i.
- b. Pernikahannya adalah pernikahan yang sah bukan pernikahan yang fasid.
- c. Si suami adalah orang yang bisa memberikan kesaksian bagi orang muslim.

Sementara itu ulama Mazhab Syafi'i dan Madzhab Hambali mengemukakan tiga syarat dalam li'an, yaitu:

- a. Status mereka masih suami istri, sekalipun belum bergaul.
- b. Adanya tuduhan berbuat zina dari suami terhadap istri.
- c. Istri mengingkari tuduhan tersebut sampai berakhirnya proses dan hukum li'an.³⁴

Adapun syarat sahnya proses li'an, menurut ulama Madzhab Hambali ada enam, sebagiannya disepakati oleh ulama lain dan sebagiannya tidak.

³² Moh. Rifa', Moh. Zuhri, dkk, *op. cit*, hlm. 330.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 2007, Terjemahan. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam 9, Jakarta: Gema Insani*, 2011, hlm.10

³⁴ Abdul Azis Dahlan, *op.cit*, hlm.1011

- a. Li'an dilakukan di hadapan hakim. Syarat ini disetujui ulama lain.
- b. Li'an dilaksanakan suami setelah diminta hakim.
- c. Lafal li'an yang lima kali itu diucapkan secara sempurna. Syarat ini pun disepakati ulama.
- d. Lafal yang digunakan sesuai dengan yang ada dalam al Qur'an. Terdapat perbedaan ulama jika lafal itu diganti dengan lafal lain. Misalnya, lafal "Sesungguhnya saya adalah orang yang benar" ditukar dengan "Sesungguhnya dia telah berzina," atau lafal bahwa dia(suami) termasuk orang yang berdusta "diganti dengan "sesungguhnya dia berdusta." Jika lafal pengganti itu adalah salah satu lafal sumpah seperti "ahlif" dan "aqsimu" (keduanya berarti saya bersumpah). Menurut ulama Syafi'i dan Hanbali, tidak bisa digunakan dalam li'an. Menurut mereka, kalimat yang dibolehkan itu hanya kalimat "asyhadu" (saya bersaksi). Pendapat ini juga dianut Maliki dan Hanafi.
- e. Proses li'an harus berurutan, dimulai dengan sumpah suami empat kali dan yang kelima suami melaknat dirinya. Tidak boleh sebaliknya dan tidak boleh diubah. Syarat ini disetujui ulama lain.
- f. Jika suami istri itu hadir dalam persidangan li'an, maka keduanya boleh mengajukan isyarat untuk menunjuk pihak lainnya.³⁵

Setelah syarat li'an terpenuhi, suami istri juga harus memenuhi rukun yang ada dalam li'an. Bagi ulama Madzab Hanafi, rukun li'an hanyalah persaksian secara

³⁵ *Ibid*, hlm. 1011

meyakinkan melalui sumpah.³⁶ Akan tetapi jumhur ulama mengemukakan empat rukun li'an yaitu:

a. Suami³⁷

Ditinjau dari segi suami itu adalah orang yang bersumpah untuk menegakkan kesaksian dan dari segi ia adalah orang yang menuduh orang lain berbuat zina, yang untuk itu patut dikenai sanksi fitnah berbuat zina, maka suami itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Ia adalah seorang yang sudah dikenai beban hukum atau mukallaf, yaitu telah dewasa, sehat akalnya dan berbuat dengan kesadaran sendiri.
- (2) Suami itu adalah muslim, adil, dan tidak pernah dihukum karena *qazaf*.
- (3) Suami tidak mampu mendatangkan saksi empat orang untuk membuktikan tuduhan zina yang dilemparkannya kepada istrinya.

b. Istri yang dili'an.³⁸

Adapun syarat istri yang harus diterpenuhi untuk sahnya li'an yang diucapkan suaminya adalah sebagai berikut:

- (1) Ia adalah istri yang masih terikat tali perkawinan dengan suaminya.
- (2) Ia adalah seorang mukallaf dalam arti sudah dewasa, sehat akal dan berbuat penuh dengan kesadaran.
- (3) Ia adalah seorang muhsan yaitu bersih dari kemungkinan sifat-sifat tercela yang menyebabkan dia pantas untuk dituduh berzina.

c. Tuduhan suami bahwa istri telah berbuat zina.I

³⁶ *Ibid*, hlm. 1010

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 294.

³⁸ *Ibid*, hlm.295

bnu Rusyd menjelaskan bahwa tuduhan berzina tidak terlepas dari ketentuan musyahadah (kesaksian). Yakni, seseorang mengaku bahwa ia menyaksikan istrinya berzina, sebagaimana layaknya saksi yang menyaksikan perbuatan zina atau tuduhan ini bersifat mutlak tanpa ikatan (maksudnya berbuat zina). Dan jika ia mengingkari kandungan, maka adakalanya ia mengatakan bahwa ia tidak mencampuri istrinya sesudah istrinya itu beristibra' (membebaskan rahimnya dari kandungannya).³⁹

d. Lafadz li'an.⁴⁰

3. Tatacara Pelaksanaan Li'an.

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam bukunya *Fiqhus Sunnah Lin Nisaa'* menyimpulkan bahwa tata cara pelaksanaan li'an sebagai berikut:

- a. Sebelum saling melaknat, hakim mesti mengingatkan pasangan suami istri itu agar bertobat. Tapi jika tetap kukuh dengan pendirian masing-masing.
- b. Hakim memulai proses li'an dari suami. Hakim menyuruhnya berdiri lalu berkata, "Katakanlah empat kali, 'aku bersaksi dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar atas tuduhanku kepada istriku bahwa dirinya telah melakukan perbuatan zina.'" Suami membalas, "Aku bersaksi dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar (empat kali)."
- c. Hakim menyuruh seseorang untuk menutup mulut sang suami, lalu berkata, "Takutlah kepada Allah, sesungguhnya sumpah yang kalimat ini pasti berlaku."

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Tarjamah, Abdurrahman, Haris Abdullah, *Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990, hlm. 592

⁴⁰ Abdul Azis Dahlan, *op.cit*, hlm.1011

Tujuannya adalah agar dia tidak langsung mengucapkan sumpah kelima sebelum dinasehati, karena hukuman di dunia jauh lebih ringan daripada siksa Allah di akhirat.

- d. Jika suami tetap melanjutkan, maka dia berkata, “Dan aku bersedia mendapat laknat Allah, jika aku termasuk orang-orang yang berdusta. “Dengan mengucapkan sumpah yang kelima, maka gugurlah hukuman atas tuduhan berzina terhadap istrinya. Tapi jika dia mencabut kembali sumpahnya itu, maka dia dihukum dengan hukuman *qadzaf* (melakukan tuduhan berbuat zina) yakni dicambuk 80 kali.
- e. Lalu giliran hakim berbicara kepada istri, “Engkau bersedia melakukan li’an atau tidak, maka engkau dikenakan hukuman melakukan zina.”
- f. Istri berkata, “Demi Allah, sesungguhnya dia (suami) itu termasuk orang-orang yang berdusta (empat kali).”
- g. Hakim menyuruh seseorang untuk menghentikannya, agar ada kesempatan untuk menyampaikan nasihat kepadanya dan menjelaskan bahwa dia akan mendapatkan murka Allah (jika berdusta), sebelum menyatakan sumpah kelima.
- h. Jika istri mencabut sumpahnya dan mengakui perbuatannya, maka dia dihukum dengan hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang berbuat zina.
- i. Tapi jika dia tetap tidak mau mengakuinya, maka dia disuruh untuk menyatakan, “Aku bersedia menerima murka Allah, jika dia (suamiku) termasuk orang-orang

yang benar.” Setelah menyatakan sumpah kelima itu, maka gugurlah hukuman melakukan zina atas dirinya.⁴¹

4. Akibat Sumpah Li'an dari Segi Hukum

Sebagai akibat dari sumpah li'an yang berdampak pada suami istri, menimbulkan perubahan pada ketentuan hukuk yang mestinya dapat berlaku bagi salah satu pihak (suami istri). Perubahan ini antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Gugurnya hukuman qadf bagi suami dan gugurnya hukuman zina bagi istri.
- b. Haramnya melakukan hubungan suami istri sekalipun sebelum mereka dipisahkan.
- c. Hubungan suami istri mereka wajib diputuskan.
- d. Talak yang jatuh disebabkan li'an menurut Imam Hanafi adalah talak ba'in, menurut Imam Maliki, Imam Abu Yusuf, perceraian akibat li'am adalah fasakh, sehingga mereka haram kawin untuk selama-lamanya.⁴²
- e. Apabila ada anak, maka tidak dapat diakui oleh suami sebagai anaknya. Dalam masalah warisan anak itu tidak mendapatkan warisan dari ayahnya yang melakukan li'an itu, dia hanya mendapatkan warisan dari ibunya saja. Kedudukan anak li'an sama dengan anak zina.⁴³

5. Batas Waktu Suami Mengingkari Anak Dalam Li'an Menurut Para Ulama

Dari persoalan ini fuqaha berselisih pendapat mengenai satu cabang persoalan, yaitu untuk mengingkari kandungan. Jumhur ulama berpendapat bahwa suami boleh mengingkarinya sewaktu istrinya hamil. Imam Malik mensyaratkan, apabila suami

⁴¹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisaa'*, Darul Bayan al-Haditsah, Terjemahan. Asep Sobari, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007, hlm. 800.

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *op. cit*, hlm. 1012.

⁴³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 192.

boleh mengingkari kandungan pada masa kehamilan, maka ia tidak boleh mengingkarinya sesudah kelahiran dengan li'an.⁴⁴

Imam Syafi'i berpendapat, apabila suami mengetahui kehamilan istrinya kemudian hakim memberi kesempatan kepadanya untuk berli'an tetapi ia tidak mau berlian maka ada hak baginya untuk mengingkari kandungan sesudah kelahiran. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa suami tidak boleh mengingkari anak sampai istri melahirkannya. Adapun alasan Abu Hanifah yaitu kandungan itu terkadang mengalami keguguran. Abu Hanifah juga berpendapat bahwa suami boleh berli'an sekalipun ia tidak mengingkari kandungan, kecuali pada waktu melahirkan dan menjelang saat melahirkan. Tetapi Abu Hanifah tidak memberikan batasan waktu bagi pengingkaran tersebut.⁴⁵

Kedua pengikut Abu Hanifah yakni Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa suami boleh mengingkari kandungan kandungan istri dalam tempo empat puluh malam sejak kelahiran.⁴⁶

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *op.cit*, hlm. 675.

⁴⁵ Ibid. hlm. 676.

⁴⁶ Ibid.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PASAL 102 KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari bahasa latin yaitu diambil dari kata *compile* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, contohnya adalah mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana.¹ Istilah ini kemudian dikemukakan menjadi *compilation* (dalam bahasa Inggris) atau *copilatie* (dalam bahasa Belanda), istilah-istilah tersebut kemudian diserap atau diadopsi kedalam bahasa Indonesia dengan nama “Kompilasi”.²

Ditinjau dari sudut bahasa kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian kompilasi menurut hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.³

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu diantara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. Secara tidak langsung ia juga merefleksi tingkat keberhasilan tersebut. Sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat memberikan penilaian tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, karena Kompilasi Hukum Islam harus

¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992, Hlm. 10.

²*Ibid.*

³*Ibid.* hlm. 12

dilihat bukan sebagai sebuah final, maka kita juga dapat melihatnya sebagai salah satu jenjang dalam usaha tersebut dan sekaligus juga menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik dimasa mendatang.⁴

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan tersebut.⁵

Di dalam sejarah hukum Islam, terdapat pergeseran kearah kesatuan hukum Islam dalam bentuk hukum-hukum tertulis yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Pergeseran hukum Islam menjadi hukum tertulis terbagi menjadi 3 periode:

1) Periode awal sampai tahun 1945

Sebelum 1945 di Indonesia berlaku sistem hukum yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Kedudukannya disebutkan dalam perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktik peradilan.

Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Samudra Pasai di Aceh Utara pada akhir abad ke-13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama, kemudian diikuti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan lainnya.

⁴*Ibid.* Hlm. 6`

⁵Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 1.

Pada zaman VOC kedudukan hukum Islam di dalam bidang kekeluargaan, diakui bahkan dikumpulkan pada sebuah peraturan yang dikenal dengan Compendium Freijer. Selain itu telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makassar.⁶

Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah *godsdienstige wetten*, sebagaimana terlihat pada pasal 75 (lama) *Regeering Reglemen* tahun 1855. Kemudian ditegaskan dalam pasal 78 ayat 2 *Regeering Reglemen* 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Bumiputra, atau dengan mereka yang disamakan dengan Bumiputra, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan masalah itu menurut undang-undang agama atau ketentuan mereka. Peradilan yang diperuntukkan bagi mereka yang telah ditentukan yaitu *Priesterraad* (Peradilan Agama), sebagaimana tercantum dalam *Staatsblaad* 1882 Nomor 152 Pasal 1 dinyatakan: “Di samping setiap *Lanandraad* di Jawa dan Madura diadakan satu Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum *Landraad*”. Dulunya Pengadilan Agama disebut dengan nama *Priesterraad* yang artinya “Majlis Padri”. Nama ini sebenarnya keliru, sebab dalam agama Islam tidak ada Padri. Padri atau Paderi dimaknakan sebagai pendeta Khatolik atau pendeta Kristen atau peperangan yang terjadi di Sumatra Barat pada 1921-1927. Pada mulanya *Staatsblad* 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama; pengadilan ini sendiri menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya, dan pada umumnya perkara ini

⁶*Ibid.* hlm. 2

berhubungan dengan pernikahan, yaitu perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.

Jadi, sebelum awal tahun 1945 sistem hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, kedudukannya tersebut disebutkan dalam perundang-undangan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam, kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia kemudian memberlakukan hukum Islam di wilayahnya masing-masing. Secara tertulis pada zaman Belanda hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda.

Pada waktu itu, Staatsblad 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama, pengadilan tersebut hanya memutuskan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, diantaranya perceraian, mahar nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.⁷

2) Periode 1945 sampai dengan tahun 1985

Pemerintah Republik Indonesia menemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antar satu dengan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1954 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan yang bersifat propensialitis dan tidak sesuai dengan Negara RI sebagai Negara kesatuan. Peraturan-peraturan tersebut ialah Huwelijksordonnantie S 1929 No. 348 jo. S 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482.

⁷*Ibid*, hlm. 2-3.

Pada saat ini telah terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam ke arah tertulis dan termuat dalam penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, dijelaskan juga bahwa hukum perkawinan, talak, dan rujuk (bagi umat Islam) sedang dikerjakan oleh penyelidik hukum perkawinan, talak dan rujuk yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan.⁸

Hal demikian sejalan dengan dikeluarkannya Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai tindak lanjut dari PP No. 45 Tahun 1957 dianjurkan kepada para hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah agar mempergunakan kitab-kitab fiqh mu'tabarah sebagai berikut:

- a. *Al-Bajuri*.
- b. *Fath al-Mu'in dan Syarah*.
- c. *Syarqawi 'Ala al-Tahrir*.
- d. *Qalyubi /Al-Mahalli*.
- e. *Tuhfah*.
- f. *Tarqib al-Musytaq*.
- g. *Al-Qawanin al-Syar'iyah (li 'Usman ibn Yahya)*.
- h. *Fath al-Wahab dan Syarahnya*.
- i. *Al-Qawanin al-syar'iyah (li Sadaqah Dahlan)*.
- j. *Syamsuri li al-Faraid*.
- k. *Bughyah al-Mustarsyidin*.
- l. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*.
- m. *Mugni al- Muhtaj*.⁹

Lahirnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik merupakan pergeseran bagian dari hukum Islam kearah hukum tertulis. Namun demikian, bagian-bagian tentang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan lain-lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama masih berada di luar hukum tertulis.¹⁰

⁸ *Ibid*, hlm. 5-6.

⁹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001, hlm. 85-86.

¹⁰ Amin Husein Nasution, *Op.cit*, hlm. 7.

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksana Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerja Sama Mahkamah Agung/Departemen Agama). Setelah adanya kerjasama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat sebagian, masih sebagai hukum tidak tertulis, menampilkan diri dalam rangka seminar, *symposium*, dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu.¹¹

Dalam kegiatan tersebut telah diikuti sertakan ahli hukum dan beberapa kalangan hukum terkait seperti Hakim, Pengacara, Notaris, Kalangan Perguruan Tinggi, Departemen Kehakiman, IAIN dan juga tokoh-tokoh masyarakat, Ulama dan Cendekiawan Muslim serta perorangan lainnya.

3) Periode 1985 sampai sekarang

Periode ini dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksana proyek

¹⁰ Amin Husein Nasution, *op.cit*, hlm. 7.

¹¹ *Ibid*, hlm. 7-8.

pembangunan hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Mei di Yogyakarta.¹²

Surat Keputusan Bersama tersebut berisi penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai Proyek Kompilasi Hukum Islam dimulailah kegiatan proyek dimaksud yang berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp 230.000.000.00. Biaya sebesar ini tidak berasal dari APBN tetapi langsung dari Presiden Soeharto sendiri.¹³

Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut ditetapkan bahwa Pimpinan Utama Umum dari proyek adalah Prof. H. Busthanul Arifin, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan dibantu oleh dua orang Wakil Pimpinan Umum masing-masing HR. Djoko Soegianto, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata tidak tertulis, dan H. Zaini Dahlan, MA Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.¹⁴

Sebagai pimpinan pelaksana proyek adalah H. Masrani Basran, SH. Hakim Agung Mahkamah Agung dengan wakil Pimpinan Pelaksanaan H. Muchtar Zarkasih, SH. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama. Sebagai sekretaris adalah Ny. Lies Sugondo, SH, Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan wakil sekretaria Drs. Marfuddin Kosasih, SH. Bendahara

¹² Amin Husein Nasution, *Op. cit*, hlm. 9.

¹³ Abdurrahman, *Op. cit*, hlm. 34.

¹⁴ *Ibid.*

adalah Alex Marbun dari Mahkamah Agung dan Drs. Kadi dari Departemen Agama.

Di samping itu ada pula pelaksana bidang yang meliputi:

a. Pelaksana Bidang Kitab/Yurisprudensi:

- (1) Prof. H. Ibrahim Husein LML (dari Majelis Ulama)
- (2) Prof. H. MD. Kholid, SH. (Hakim Agung Mahkamah Agung)
- (3) Wasit Aulawi MA (Pejabat Departemen Agama)

b. Pelaksana Bidang Wawancara:

- (1) M. Yahya Harahap, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung)
- (2) Abdul Gani Abdullah, SH (Pejabat Departemen Agama)

c. Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data:

- (1) H. Amiroeddin Noer, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung)
- (2) Drs. Muhaimin Nur, SH (Pejabat Departemen Agama)¹⁵

Menurut Lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Mei 1985 tersebut di atas di tentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha Pembangunan Hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

a. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan/pengkajian kitab-kitab.

¹⁵*Ibid.* Hlm. 35.

b. Wawancara.

Wawancara dilakukan dengan para ulama.

c. Lokakarya.

Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.

d. Studi perbandingan.

Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/seminar-seminar satu sama lain dengan jalan memperbandingkan dari Negara-Negara Islam lainnya.¹⁶

Secara lebih jelas bagaimana pelaksanaan proyek melalui jalur-jalur tersebut dapat kita simak dari uraian yang pernah dibuat oleh pimpinan pelaksana proyek Hakim Agung H. Masrani Basran, SH, diantaranya:

a. Jalur Kitab

Bagian ini telah menyusun daftar kitab-kitab fiqh yang berpengaruh di Indonesia dan di Dunia Islam, yang selama ini juga telah menjadi kitab-kitab rujukan bagi para hakim Peradilan Agama di Indonesia.¹⁷

Dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/kitab-kitab fiqh, minimal 13 kitab, dikumpulkan dibuat berbagai permasalahan-permasalahan hukum, kemudian kepada Perguruan Tinggi Islam/IAIN di Indonesia dimintakan untuk membuat bagaimana pendapat masing-masing kitab itu, dan juga kitab-kitab lainnya mengenai masalah-masalah hukum yang telah diselesaikan.¹⁸ Dalam penelitian Kitab-kitab Fiqh sebagai

¹⁶*Ibid*, hlm. 15.

¹⁷ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 59.

¹⁸ Abdurrahman, *Op. Cit*, hlm. 37.

sumber Kompilasi Hukum Islam telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 buah/macam kitab fiqh yang dibagi pada 7 IAIN yang telah ditunjuk yaitu:

- a) IAIN Ar-Raniri Banda Aceh:
 - a. *Al Bajuri*
 - b. *Fathul Mu'in*
 - c. *Syarqawi 'ala al-Tahrier*
 - d. *Mughni Muhtaj.*
 - e. *Nihayah Al Muhtaj.*
 - f. *Asy Syarqawi.*
- b) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta:
 - a. *I'annah al-Thalibien.*
 - b. *Tuhfa.*
 - c. *Tarqhib al-Musytaq.*
 - d. *Bulghat al-Salik.*
 - e. *Syamsuri fil Faraidl.*
 - f. *Al-Mudawwanah.*
- c) IAIN Antasari Banjarmasin:
 - a. *Qalyubi/Mahalli*
 - b. *Fath al-Wahab.*
 - c. *Bidayah al-Mujtahid.*
 - d. *Al-Umm.*
 - e. *Bughyatul Mustarsyidien.*
 - f. *Aqidah wa Syari'ah.*
- d) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:
 - a. *Al-Muhalla.*
 - b. *Al-Wajiz.*
 - c. *Fath al-Qadier.*
 - d. *Alfiqh Ala Madzahib al-Arba'ah.*
 - e. *Fiqh al-Sunnah.*
- e) IAIN Sunan Ampel Surabaya:
 - a. *Kasyaf al-Qina.*
 - b. *Majmu'atu Fatawi.*
 - c. *Qawanin Syal'ah lis Sayid Usman bin Yahya.*
 - d. *Al-Mughni.*
 - e. *Al-Hidayah Syarah Bidayah al-Mubtadi.*
- f) IAIN Alauddin Ujung Pandang:
 - a. *Qawanin Syari'iyah Sayid Sudaqah Dahlan.*
 - b. *Nawab al-Jalil.*
 - c. *Syarh Ibn 'Abidin.*
 - d. *Al-Muwattha'.*
 - e. *Hasyiah Syamsuddin Moh. Irfat Dasuki.*
- g) IAIN Imam Bonjol Padang:
 - a. *Bada'i al-Sanai.*
 - b. *Tabyin al-Haqaiq.*

- c. *Al-fatawa al-Hindiyah*.
- d. *Fath al-Qadir*.
- e. *Nihayah*.

Bila kita lihat yang dibahas ternyata telah mengalami banyak sekali perluasan dari masa-masa yang lalu .misalnya kitab-kitab dimaksud ternyata tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqh Syafi'i saja, akan tetapi dari mazhab lain bahkan dari pemikiran aliran pembaharu seperti buku-buku Ibn Taimiyah.¹⁹

b. Jalur Ulama.

Jalur kedua ini dilaksanakan dengan mengumpulkan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang fiqh Islam, agar seluruh ulama Indonesia ikut serta dalam wawancara ini.²⁰ Wawancara ini diambil dari 10 wilayah, diantaranya:

- a. Banda Aceh, di Banda Aceh melakukan wawancara sebanyak 20 ulama.
- b. Medan, sebanyak 19 ulama.
- c. Palembang, sebanyak 20 ulama.
- d. Padang, sebanyak 20 ulama.
- e. Bandung, sebanyak 16 ulama.
- f. Surakarta, sebanyak 18 ulama.
- g. Surabaya, sebanyak 18 ulama.
- h. Banjarmasin, sebanyak 15 ulama.
- i. Ujung Pandang, sebanyak 20 ulama.
- j. Mataram, sebanyak 20 ulama.²¹

Kegiatan wawancara ini sudah diselesaikan dalam bulan Oktober dan November 1985. Ditambahkannya bahwa para ulama kita baik perseorangan maupun golongan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 41.

²⁰ Busthanul Arifin, *Op.cit*, hlm. 59.

²¹ Amin Husein Nasution, *Op. cit*, hlm. 19.

yang mewakili ormas-ormas Islam yang ada telah memberikan support/dukungan dan partisipasi aktif dalam jawaban atas questionnaires yang diajukan.²²

c. Jalur Yurisprudensi.

Berkenaan dengan masalah penggarapan melalui jalur yurisprudensi, tidak banyak keterangan yang diberikan oleh para penulis mengenai kompilasi. Dalam uraian Penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Agama bahwa Jalur penelitian yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku, yaitu:

- a) Himpunan putusan PA/PTA3 buku, yaitu terbitan Tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981.
- b) Himpunan fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979 1979/1980, dan 1980/1981.
- c) Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984.
- d) Law Report 4 buku yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984.²³

d. Studi Perbandingan.

Kemudian mengenai pelaksanaan jalur keempat sebagaimana dikemukakan dalam uraian dimuka adalah dengan melakukan studi banding ke beberapa Negara. Melalui studi banding ini menurut Bustanul Arifin kita pelajari bagaimana negara-negara yang memberlakukan hukum Islam, yakni bidang-bidang yang akan dikompilasi di Indonesia. Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi beberapa Negara Islam antara lain, Pakistan, Mesir dan Turki. Kemungkinan besar karena keterbatasan dana, pelaksanaannya bisa dipercayakan kepada mahasiswa yang berada disana.²⁴

²² Abdurrahman, *Op. cit*, hlm. 38.

²³ *Ibid*, hlm. 43-44

²⁴ *Ibid*,

Studi perbandingan tersebut dilaksanakan oleh H. Masrani Basrah SH, Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan H. Muchtar Zarkasyi SH, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI. Dan informasi bahan masukan yang diperoleh diantaranya:

- a. System Peradilan.
- b. Masuknya Syariah *Law* dan dalam arus Tata Hukum Nasional.
- c. Sumber-sumber hukum dan materiil yang menjadi pegangan/terapan hukum di bidang *Ahwalussyakhsyah* yang menyangkut kepentingan *Muslim*.²⁵
- e. Lokakarya.

Pada upacara penyerahan naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Mahkamah Agung RI, H. Ali Said, SH. dan Menteri Agama RI, H. Munawir Sjadzali, M.A., tentang pelaksanaan lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi pada bulan Februari 1988.

Lokakarya tersebut dilaksanakan pada tanggal 2-6 Februari 1988 di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dibuka oleh Mahkamah Agung RI, Ali Said, S.H., dan ditutup oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. H. Purwoto Ganda Subroto, S.H., dimaksud untuk mendengarkan komentar akhir para ulama dan cendikiawan Muslim.²⁶

Dalam lokakarya tersebut ditunjuk tiga Komisi. Diantaranya:

- (1) Komisi 1 Bidang Hukum Perkawinan diketuai oleh H. Yahya Harahap DH, sekretaris Drs. M. H. Mahfudin Kosasih SH. Nara sumber KH, Halim Muchammad SH. Dengan anggota sebanyak 42 orang.

²⁵*Ibid*,

²⁶Amin Husein Nasution, *Op. cit*, hlm. 30.

(2) Ketua Komisi II Bidang Hukum Warisan diketuai oleh H.A Wasit Aulawi MA, dengan sekretaris H. Zainal Abidin Abu Bakar SH, nara sumber KH. A. Azhar Basyir MA dengan beranggota sebanyak 42 orang.

(3) Komisi III Bidang Hukum Perwakafan diketuai oleh H. Masrani Basran SH. Sekretaris DR. H. A Gani Abdullah SH, nara sumber Prof. Dr. Rahmat Jatnika, beranggota 29 orang.

Perumusan materi dilakukan di Komisi dan masing-masing Komisi dan untuk itu dibentuk Tim Perumusannya, yaitu:

1) Tim Perumus Komisi A tentang Hukum Perkawinan:

- a) H.M. Yahya Harahap, SH.
- b) Drs. Marfuddin Kosasih, SH.
- c) KH. Halim Muhammad, SH.
- d) H. Muchtar Zarkasyi, SH.
- e) KH. Ali Yafie.
- f) KH. Najih Ahyad.

2) Tim Perumus Komisi B tentang Hukum Kewarisan.

- a) H.A. Wasit Aulawi, MA.
- b) H. Zainal Abidin Abubakar. SH.
- c) KH. Azhar Basyir, MA.
- d) Prof. KH. Md. Kholid, SH.
- e) Drs. Ersyad, SH.

3) Tim Perumus Komisi C tentang Hukum Wakaf:

- a) H. Masrani Basran, SH.

- b) DR. H.A. Gani Abdullah, SH.
- c) Prof. DR. H. Rahmat Djanika.
- d) Prof. KH. Ibrahim Husein, LML.
- e) KH. Aziz Masyhuri.

Dalam Lokakarya Nasional tersebut disepakati perlunya dirumuskan Hukum Islam yang bercorak Indonesia. Diantara peserta Lokakarya menginginkan Kompilasi dapat diundangkan melalui Undang-undang. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran jika Kompilasi dikeluarkan dalam bentuk Undang-undang, sudah barang tentu melalui DPR, diperkirakan akan menemui kesulitan dan memakan waktu yang sangat lama jika tidak malah berlarut-larut. Sebagian lain menginginkan agar dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Agak tarik-menarik antara Kompilasi diwujudkan dalam bentuk Undang-undang atau paling tidak peraturan pemerintah cukup kuat.²⁷

Pada akhirnya melalui perdebatan panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan dan ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah, secara formal dan secara de jure Kompilasi Hukum Islam “diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.²⁸

Isi pokok Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tersebut adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama RI untuk, pertama menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari

²⁷ Ahmad Rofiq, *Op. cit*, hlm. 94.

²⁸ *Ibid.* hlm. 95-96.

- a) Buku I tentang Hukum Perkawinan.
- b) Buku II tentang Hukum Kewarisan.
- c) Buku III tentang Buku Perwakafan.

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya di Jakarta tanggal 2-5 Pebruari 1988, untuk dugunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan. Kedua, melaksanakan Intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Selanjutnya, Intruksi Presiden ditindaklanjuti oleh Menteri Agama RI melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 152 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Pelaksanaan penyebarluasannya dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No.3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.²⁹

B. Ketentuan Pasal 102 tentang Batas Waktu Suami Mengingkari Anak dalam Kasus Li'an.

Dalam pernikahan apabila terjadi perselisihan dimana suami tidak mau mengakui anak yang dilahirkan istrinya maka solusi yang diberikan dalam hukum di Indonesia adalah dengan melakukan li'an. Hal ini diterangkan dalam KHI pasal 101 bahwa "Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedangkan istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an."³⁰

²⁹ *Ibid*, hlm. 96.

³⁰ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009, hlm. 32.

KUH Perdata tidak mencantumkan kata li'an namun lebih menjelaskan pada pengingkaran anak yang dapat dilakukan oleh suami, pengingkaran anak yang dilakukan suami membawa hukum baru terhadap anak yang dilahirkan istri, meskipun anak tersebut lahir dari atau dalam perkawinan yang sah. Setelah suami mengingkari anak yang dilahirkan istri maka anak tersebut menjadi anak tidak sah, dimana ia tidak memiliki hubungan nasab dengan suami dari ibu yang melahirkannya.

Adapun prosedur pengingkaran anak yang dilakukan suami itu diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam KUH Perdata pasal 252 "Dia dapat mengingkari keabsahan seorang anak, yang dilahirkan tiga ratus hari setelah putusan pisah meja dan rancangan memperoleh kekuatan hukum yang pasti, tanpa mengurangi hak istrinya untuk mengemukakan peristiwa-peristiwa yang cocok kiranya untuk menjadikan bukti bahwa suaminya adalah bapak anak itu. Bila pengingkaran itu dinyatakan telah sah, perdamaian antara suami istri itu tidak menyebabkan si anak memperoleh kedudukan sebagai anak sah." Dalam pasal 256 KUH Perdata memberi batasan waktu mengingkari anak sebagai berikut,

1. Satu bulan jika ia tinggal di tempat kelahiran si anak atau sekitarnya.
2. Dua bulan setelah pulang kembalinya, jika ia berada dalam keadaan tidak hadir.
3. Dua bulan setelah tipu muslihat diketahuinya, jika kelahiran anak tersebut disembunyikan darinya.

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa Ulama Madzhab berbeda pendapat mengenai waktu mengingkari anak dalam kasus li'an. Malik mensyaratkan, suami harus mengingkari kandungan istrinya untuk dapat melakukan li'an. Syafi'i juga sependapat dengan Imam Malik dan berbeda dengan abu

Hanifah yang mengatakan bahwa mengingkari anak dapat dilakukan ketika istri melahirkan.³¹

Berbeda dari KHI yang menjelaskan tentang batas waktu suami melayangkan gugatan pengingkaran anak, pasal 102 menjelaskan bahwa,

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama.
2. Pengingkaran sesudah masa lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Batasan 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga waktu 360 hari bukan menunjukan batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Al- Qur'an member petunjuk yang jelas tentang masalah ini. Batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung saat akad nikah dilangsungkan.³² Ketentuan ini diambil dari firman Allah:

وَحَمْلُهُ، وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا³³

Artinya : “Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 (tiga puluh) bulan (dua setengah tahun)”. (QS. al-Ahqaf,46:15)

حَمْلُهُ وَهَذَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ³⁴

Artinya : “Ibunya telah menyapihnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun”. (QS. Luqman, 31:14)

Kedua ayat itu oleh Ibn Abbas dan disetujui para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapihnya setelah

³¹ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*, Beirut: Dar al- Jiil,1989. Terjemahan Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 675

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 101

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti, bayi membutuhkan waktu 30 bulan - 24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan. Oleh sebab itu bayi kurang dari enam bulan tidak bisa dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya saja seperti diterangkan dalam KHI pasal 100.³⁵

Pasal 102 KHI tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sah tidaknya anak yang dilahirkan istri.³⁶ KHI disebut juga sebagai fiqh Indonesia dimana ia menggabungkan seluruh pemikiran Imam Madzhab yang dianut di Indonesia dan melihat kondisi masyarakat Indonesia sebagai acuan dalam perumusan pasal-pasal dalam KHI. Pasal 102 lebih di arahkan pada waktu yang sama dengan kandungan yang dapat melahirkan anak sah yaitu masa hamil minimal 6 bulan dari akad dan masa hamil maksimal 360 hari.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa adanya perbedaan mengenai batas waktu suami mengingkari anak dalam kasus li'an, dimana KUH Perdata menyebutkan bahwa pengingkaran anak dilakukan 300 hari sesudah sidang perceraian, KHI menyebutkan batas waktu mengajukan gugatan pengingkaran anak adalah 180 hari setelah anak lahir dan 360 hari setelah putusya perceraian. Sedangkan menurut Imam Madzhab ada yang menyebutkan mengingkari anak harus dilakukan saat istri hamil dan ada juga Imam Madzhab yang menyebutkan bahwa pengingkaran anak harus menunggu anak itu lahir.

³⁵ *Ibid.* hlm. 102

³⁶ *Ibid.* hlm. 101

BAB IV

ANALISIS KETENTUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 102 TENTANG BATAS WAKTU SUAMI MENGINGKARI ANAK DALAM KASUS LI'AN

A. Analisis Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 102 tentang Batas Waktu Suami Meningkari Anak dalam Kasus Li'an

Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat antara suami dan istri. Kekuatan ikatan perkawinan tersebut yang terikat bukan hanya lahiriyah saja, melainkan juga terikat secara batiniyah antara suami istri dan hubungan antara suami istri dengan masing-masing orang tuanya. Akibat hukum adanya ikatan perkawinan yang sah adalah melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri, juga hak dan kewajiban dengan pihak lain yaitu adanya hak yang harus diterima oleh anak yang dilahirkan suami istri tersebut. Adapun hak anak yang dilahirkan orang tuanya adalah hak nasab bagi anak, hak mendapatkan pengasuhan, hak memperoleh perwalian, hak menerima biaya hidup dan hak kewarisan.¹

Setiap anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini berhak mendapatkan pengakuan nasab dari kedua orang tuanya. Di mana anak bisa mendapatkan pertalian nasab dengan kedua orang tuanya dan anak bisa disebut anak sah itu tergantung dari masa saat dia dilahirkan atau hubungan yang menjadikan anak tersebut lahir. Telah dijelaskan penulis pada bab II bahwa perkawinan yang mengakibatkan sahnya hubungan keturunan itu harus melengkapi empat syarat yaitu:²

¹ Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014

² Zakariya Ahmad al Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 16-20

- 1) Hamilnya istri itu merupakan sesuatu yang mungkin, seperti suami sudah dewasa.
- 2) Istri melahirkan anaknya sedikitnya enam bulan dari tanggal dilangsungkannya akad.
- 3) Istri melahirkan anak nya dari masa masa kurang dari 2 tahun masa kehamilan.
- 4) Suami tidak mengingkari anak tersebut.

Dalam point 4 di atas disebutkan bahwa syarat sahnya anak yang lahir dalam perkawinan yaitu dengan tidak adanya pengingkaran anak yang dilahirkan istri oleh suami. Apabila suami mengingkari anak yang dilahirkan istri bukan berarti anak tersebut bukan anak sah meskipun dalam KHI pasal 101 menyebutkan bahwa seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedangkan istri tidak menyangkalnya, dapat diteguhkan dengan li'an. Hal ini juga dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan pasal yaitu, seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut dan Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Keabsahan anak harus dibuktikan dimuka hakim tidak hanya semena-mena suami karena alasan bahwa suami mempunyai hak untuk mengingkari anak.

Li'an adalah saling menyatakan bahwa bersedia dilaknat Allah setelah mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah yang dilakukan oleh suami dan istri karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan zina atau suami tidak mengakui anak yang dikandung atau

dilahirkan istrinya sebagai anaknya dan pihak istri bersikeras pula menolak tuduhan tersebut.³ Lembaga li'an hanya ada dalam hukum Islam saja, untuk agama selain Islam di Indonesia juga berlaku pengingkara anak yang dilakukan suami namun bukan dalam bentuk li'an meski prosedurnya sama dengan li'an, dengan menggunakan sumpah dalam mengingkari anak. Dalam hukum perdata yang digunakan untuk selain agama islam gugatan li'an disebut dengan gugatan perzinaan.

KUH Perdata pasal 251 atau *Bulgerlijk Wetboek* dijelaskan mengenai sebab pengingkaran anak meski bukan dinamakan li'an yaitu, keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke seratus delapan puluh dalam perkawinan suami istri, dapat diingkari suami. Namun pengingkaran ini tidak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya si istri.
- b. Jika ia telah ikut hadir tatkala akte kelahiran dibuat dan akta itu pun telah ditandatanganinya atau memuat pernyataan darinya, bahwa ia tak dapat menandatanganinya.
- c. Jika si anak tidak hidup tatkala dilahirkan.

Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang anak yang dapat diingkari oleh suami yaitu bilamana anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan sejak akad nikah dilangsungkan dan dilanjut untuk pasal 254 KUH Perdata yang juga menyebutkan tentang suami boleh mengingkari keabsahan anak yang dilahirkan 300 hari setelah terjadinya perceraian. Waktu 6 bulan merupakan masa hamil minimum dimana jika anak yang lahir kurang dari 6 bulan sejak akad pernikahan, maka anak tersebut bisa diingkari suami, dan waktu 360 hari merupakan masa hamil maximum namun dalam KUH Perdata disebut 300 hari. Jika anak lahir melebihi batas maximum kehamilan setelah terjadi perceraian maka anak itu bukan anak sah yang lahir karena perkawinan.

³Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm.186

Telah disebutkan dalam bab II bahwa menurut Abdul Manan dalam buku *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, menyebutkan bahwa salah satu dari banyaknya faktor yang menjadi penyebab terjadinya anak luar nikah yaitu anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suami sebagai anak yang sah. Anak luar nikah yang dimaksud oleh Abdul Manan adalah anak yang dilahirkan perempuan sedangkan perempuan itu tidak dalam perkawinan yang sah.

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal ini sama dengan KHI pasal 99 poin (a), yang di dalamnya memberikan toleransi hukum kepada anak yang lahir dari perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi selama bayi yang dikandung tadi lahir pada saat ibunya dalam perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Seperti yang telah penulis sebutkan diatas bahwa tetap saja suami mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pengingkaran anak meskipun anak tersebut lahir dalam atau karena perkawinan yang sah.⁴

Pengingkaran anak yang dilakukan suami membawa akibat hukum yang besar bagi status anak dan istri. Untuk itu dalam memutuskan keabsahan anak, pengadilan harus jeli terhadap bukti-bukti yang diajukan penggugat dan tergugat. Seperti yang dijelaskan dalam KHI pasal 125 bahwa li'an itu menyebabkan putusan ikatan perkawinan untuk selama-lamanya, dalam artian suami tidak bisa lagi rujuk pada istrinya itu, dan nasab anak yang lahir istri tidak bisa mendapatkan hubungan nasab dengan suami.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.222

Pengingkaran anak diatur dalam undang-undang untuk menjawab problematika rumah tangga jika salah satu pasangan berbuat zina atau melahirkan anak bukan dari benih suami. Contoh saja kasus⁵ pada tahun 2008 yang melanda artis tanah air yaitu Rahma Azhari yang ramai menjadi berita infotainment, di mana Rahma Azhari bercerai dengan Alfay Rouf dan hakim memutuskan talak satu dan mengabulkan rekonvensi soal pengingkaran anak atas Rasya Kamila Dyah yang dilayangkan Rauf. Dengan alat bukti berupa tes DNA, terbukti bahwa Rasya Kamila Dyah bukanlah anak biologis Rouf.

Setiap perkara yang akan dilayangkan ke pengadilan haruslah mematuhi hukum formil yang berlaku dalam perkara tersebut. Begitu juga dengan gugatan pengingkaran anak yang memberikan batasan waktu terhadap gugatan ini, karena hal ini merupakan hal sangat menentukan tentang masa depan anak dan istri. Seperti yang telah di rumuskan penulis, bahwa dalam bab ini penulis akan membahas mengenai batas waktu suami mengingkari anak dalam kasus li'an. Dalam KHI pasal 102 diatur tentang jangka waktu mengajukan gugatan pengingkaran anak yang dilakukan suami yaitu suami yang akan mengingkari seorang anak yang dilahirkan istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaramya kepada Pengadilan Agama. Dan pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Dalam pasal 102 tersebut tidak merinci dengan jelas kapan seorang anak bisa diingkari oleh ayahnya, UUP juga tidak menjelaskan tentang batasan waktu suami mengingkari anak. Pasal 102 KHI tidaklah menjelaskan tentang batasan minimum

⁵ M. Kompas.com/bola/read/2008/03/13/14273697/Rahma.Azhari.Resmi.Menjanda

kehamilan seorang istri yaitu 6 bulan juga tidak menjelaskan tentang batas maximum kehamilan yaitu 360 hari atau satu tahun. Waktu 180 hari adalah dimana suami diberikan jangka waktu tersebut untuk mengingkari lahirnya anak dari istrinya setelah anak yang dilahirkan istri tersebut berumur 6 bulan maka suami tidak dapat lagi mengajukan gugatan anak ke Pengadilan karena dalam waktu 6 bulan itu sudah dianggap suami menerima kehadiran anak yang dilahirkan istri. Untuk waktu 360 setelah perceraian yaitu jika setelah perceraian, suami ragu akan anaknya maka dia bisa mengajukan gugatan pengingkaran anak dengan tidak melebihi waktu 360 hari setelah waktu tersebut, Pengadilan Agama tidak menerima gugatan pengingkaran anak.

Di pasal tersebut juga terdapat kalimat “Atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.” Kalimat tersebut tidak dijelaskan dalam waktu berapa suami dapat mengajukan gugatan pengingkaran anak saat ia mengetahuinya, tidak ada batasan yang jelas ketika suami baru mengetahui tentang keabsahan anak tersebut.

Rumusan pasal 102 sedikit membuat kebingungan pada masyarakat, dimana adanya jarak yang tidak bisa difahami dalam waktu mengajukan gugatan anak. Yaitu pada waktu 180 hari sejak kelahiran anak, suami yang meragukan keabsahan anak dapat mengajukan gugatan pengingkaran anak dalam jangka waktu tersebut. Setelah jangka waktu itu terlewati maka suami tidak bisa mengajukan gugatan pengingkaran anak, dalam masa dia tidak bisa mengajukan gugatan pengingkaran anak secara otomatis anak tersebut dinasabkan kepada dirinya dan dia berkewajiban memberi penghidupan atau nafkah kepada anaknya bisa pula waris jika dia tiba-tiba meninggal karena dia tidak bisa

mengajukan gugatan pengingkaran anak ke Pengadilan. Padahal dalam KHI pasal 128 disebutkan bahwa li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan.

Jika waktu 180 hari terlewati maka suami bisa melakukan perceraian dulu setelah itu baru dapat dilakukan gugatan pengingkaran anak yang diberikan waktu 360 hari setelah terjadi perceraian. Sementara itu dalam KHI pasal 125 disebutkan bahwa li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Dapat disimpulkan bahwa li'an itu yang menjadikan perpisahan atau perceraian jadi menurut pengamatan penulis, ketika suami mengingkari anak maka suami itu hubungannya dengan istri terputus atau cerai untuk selama-lamanya yaitu tidak bisa rujuk kembali dengan istrinya itu.

Telah penulis jelaskan di atas bahwa pengingkaran anak tidak hanya terjadi untuk umat Islam saja yang dinaungi lembaga li'an namun untuk agama selain Islam di Indonesia juga diatur tentang pengingkaran anak. Dalam masalah waktu pengingkaran anak hukum perdata mengaturnya dalam KUH Perdata atau Burgerlijk wetboek pasal 256 yaitu, pengingkaran-pengingkaran anak oleh suami harus dilakukan dalam waktu satu bulan jika ia diam di tempat kelahiran si anak atau sekitarnya, dalam waktu dua bulan setelah pulang kembalinya jika ia berada dalam keadaan tak hadir. Dalam waktu dua bulan setelah tipu muslihat diketahuinya jika kelahiran anak itu disembunyikan baginya. Semua akta dibuat di luar hakim yang mengandung pengingkaran si suami, adalah tak berharga apabila dalam dua bulan perbuatan itu tak diikuti dengan suatu tuntutan di muka hakim. Jika si suami, setelah melakukan pengingkaran dengan akata di luar hakim, dalam tenggang waktu tersebut di atas, meninggal dunia maka bagi ahli

warisnya mulailah suatu tenggang waktu yang baru selama dua bulan, untuk memajukan tuntutan mereka.

Dalam KUH Perdata ini menjelaskan secara detail dengan keadaan-keadaan suami yang dapat mengajukan gugatan pengingkaran anak yaitu apabila saat istri melahirkan anak dan suami berada di tempat tersebut sementara suami tahu bahwa anak yang dilahirkan istri bukan anak hasil dari benihnya maka ada batasan suami dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan yaitu dengan tegas KUH Perdata menyebutkan satu bulan untuk suami yang berada di tempat anak dilahirkan.

Untuk suami yang berpergian jauh dan tahu bahwa istri melahirkan anak yang bukan hasil dari benihnya maka waktu pengajuan gugatan pengingkaran anak adalah dua bulan setelah ia pulang kembali. Lalu untuk suami yang tidak mengetahui istrinya melahirkan anak yang bukan darah dagingnya maka saat ia mengetahuinya batasan waktu dalam penhgaajuan gugatan pengingkaran anak adalah dua bulan saat ia mengetahui.

Tak hanya sampai itu saja KUH Perdata mengatur batasan waktu suami mengingkari anak, KUH Perdata juga memberi batasan bahwa akta pengingkaran anak yang dibuat di luar pengadilan apabila dalam waktu 2 bulan ia tidak melakukan tuntutan ke pengadilan maka akta tersebut adalah tidak sah. Namun apabila suami membuat akta di luar pengadilan dalam jangka waktu tersebut kemudian suami meninggal dunia maka akta pengingkaran anak dapat dilanjutkan ahli warisnya dengan memulai tenggang waktu yang baru.

Dari diberikannya batasan waktu dalam mengingkari anak maka terjagalah kebersihan nasab dari hal-hal yang tidak sah. Lalu bagaimana dengan status anak?, telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan adanya pengingkaran anak maka secara anak hanya

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Pembatasan waktu pengajuan gugatan pengingkaran anak sangatlah penting untuk menentukan sah atau tidaknya pengajuan gugatan pengingkaran anak yang menjadikan sah tidaknya anak yang lahir dari perkawinan. Kalau dilihat dari sisi psikologisnya bahwa anak yang diingkari ayahnya merupakan pukulan terbesar bagi anak tersebut dan sang ibu, dimana anak tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya misalkan waris.

Pengingkaran anak mempunyai dampak yang besar untuk masa depan anak dan ibunya. Bilamana waktu pengajuan gugatan pengingkaran anak sudah sesuai dengan prosedur KHI, hal itu belum jelas menentukan ketidakabsahan anak. Harus dibuktikan apakah pengingkaran anak tersebut benar-benar dapat diterima atau tidak. Setelah batas waktu pengingkaran anak dalam KHI juga turut diatur tentang pembuktian akan keabsahan anak yang lahir dalam perkawinan yaitu pasal 103:

- 1) Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- 2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Perkembangan teknologi dari masa ke masa semakin canggih, untuk itu dalam masalah penentuan nasab anak apakah benar bahwa anak yang lahir adalah anak biologis suami sebagai bukti yang akurat bukan hanya sumpah saja maka sesuai dengan poin (1) diatas alat bukti lain yaitu tes DNA. DNA merupakan singkatan dari Deoxyribo Nucleic Acid yaitu asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. DNA inilah yang menentukan jenis rambut, warna kulit dan sifat-sifat khusus dari manusia yang

dapat diturunkan ke generasi selanjutnya.⁶Dengan dilakukannya tes DNA yang menggunakan sampel dari suami, istri dan anak. Tes DNA terbilang mahal karena sekali melakukan tes DNA dipatok dengan harga 10 juta hingga 15 juta namun keakuratan akan hubungan genetik terbukti dengan jelas tanpa keraguan dalam pemutusan masalah keabsahan anak meskipun tes DNA hanya sebagai alat bukti pendukung. Dalam masalah perlindungan anak, pengingkaran anak yang dilakukan suami sangat bertolak belakang dengan beberapa pasal perlindungan anak yaitu:

- a. Pasal 7 konvensi Hak Anak (Keppres No. 36 tahun 1990) yang intinya menyatakan bahwa setelah lahirkan anak harus segera didaftarkan, diberi nama, kewarganegaraan, mengetahui dan diasuh orangtuanya.
- b. Pasal 27 Konvensi Hak Anak, menyatakan bahwa: “Orang tua, atau mereka yang bertanggung jawab terhadap anak, memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin kondisi kehidupan yang diperlukan demi pengembangan anak sesuai kemampuan anak dan kapasitas keuangan mereka.”
- c. Pasal 16 huruf d Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (UU No. 7/1984) yang menyatakan: “...hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka, yang wajib diutamakan adalah yang berhubungan dengan anak-anak.”⁷

Rumusan pasal–pasal perlindungan anak diatas mengatur bahwa setiap anak yang terlahir harus mengetahui dan diasuh orang tuanya. Dan anak berhak mendapatkan pertanggung jawaban dari orang tuanya akan adanya kelahiran anak tersebut. Maka jika

⁶Bahrudin Muhammad, *ibid*, Hlm. 223

⁷ [Www.lbh-apik.or.id/fac-40.htm](http://www.lbh-apik.or.id/fac-40.htm)

dilihat, rumusan undang-undang tentang pengingkaran anak akan mencederai undang-undang yang melindungi hak-hak anak.

Suami yang mengingkari anak harus benar-benar tahu akan akibat hukum bilamana gugatan pengingkaran anak itu dikabulkan. Untuk itu haruslah suami meninjau dahulu apakah keraguan suami tentang keabsahan anak yang dilahirkan istrinya benar adanya atau tidak, sehingga tidak melukai masa depan anak yang tidak mengetahui kisruh masalah orang tuanya. Karena dengan dikabulkannya gugatan pengingkaran anak maka akan menghapuskan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 42 dan KHI pasal 99 huruf a yaitu, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Maka kesimpulan yang dapat penulis ambil dalam hal ini yaitu, pasal 102 KHI belumlah memberikan ketegasan yang kuat mengenai batas waktu suami mengingkari anak, di mana batas waktu 180 hari dan 360 hari adalah waktu yang lama, sehingga dapat membuat suami mengulur-ulur waktu dalam mengingkari anak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 102 tentang Batas Waktu Suami Mengingkari Anak dalam Kasus Li'an.

Tuduhan berkenaan dengan li'an ini ada dalam dua bentuk. Pertama, karena melihat perbuatan zina yang dilakukan istrinya dan yang kedua menafikan anak yang dikandung istrinya. Dalam masalah penolakan nasab untuk menafikan anak yang dilahirkan istri fuqaha memberikan syarat agar nasab anak yang dilahirkan istri tidak disandarkan pada suami. Menurut⁸ Mazhab Hanafi syarat penolakan anak yaitu,

- a. Adanya keputusan qadhi untuk memisahkan suami-istri.

⁸ Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh Islam wa 'Adillatuhu*, Terjemahan. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam* 9, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 491

- b. Tidak ada pengakuan dari suami terhadap nasab anak walaupun hanya berupa tanda-tanda atau isyarat, seperti menerima ucapan selamat atas kelahiran anak tersebut.
- c. Si anak pada waktu hidup saat terjadi perceraian secara hukum.
- d. Jangan sampai lahir anak yang lain dari si istri setelah terjadi pengingkaran anak, seperti tidak menggauli istri setelah mengingkari anak.
- e. Tidak ada hukuman dengan penetapan nasab anak secara syari'at.

Syarat-syarat di atas adalah syarat yang menjadikan seorang suami dapat mengingkari anak yang dilahirkan istri. Adapun salah satu syarat untuk melakukan li'an haruslah dilakukan di depan hakim. Dimana dalam pengajuan gugatannya di terangkan dalam KHI yang mengatur tentang waktu pengajuan gugatan pengingkaran anak yaitu KHI pasal 102:

- 1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- 2) Pengingkaran yang di ajukan sudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Batasan waktu 180 hari atau 6 bulan di atas bukanlah menunjukkan usia kandungan minimal dari dilakukannya akad nikah dan waktu 360 hari bukanlah menunjukkan kehamilan seorang wanita sah setelah putus perkawinan melainkan pasal 102 tersebut menerangkan tentang batasan waktu suami dapat mengingkari anak yang di lahirkan istrinya yaitu dalam jangka waktu 180 hari sesudah kelahiran anak dan suami dapat juga mengingkari anak setelah putusnya perkawinan dalam waktu 360 hari.

Pasal 102 KHI tersebut, menurut Prof. Dr. H. Achmad Rofiq, M.A. dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa pasal tersebut tidak merinci

batas minimal dan maksimal usia kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya. Batas minimal usia kehamilan yang menjadikan anak tersebut sah menurut kesepakatan fuqaha adalah 6 bulan.

Dalam pasal 102 KHI dapat dikatakan bahwa suami yang ingin mengajukan gugatan pengingkaran anak tidak boleh melewati waktu 6 bulan sejak anak itu dilahirkan, apabila suami mengajukan gugatan pengingkaran anak melebihi waktu 6 bulan setelah kelahiran anak tersebut maka ia harus melakukan perceraian dengan ibu anak tersebut sehingga ia dapat mengajukan gugatan pengingkaran anak ke Pengadilan Agama. Sebelum hakim memutuskan perkara pengingkaran anak itu dapat dikabulkan atau tidak, tetap saja anak tersebut dinasabkan kepada suami dari ibu anak itu dimana suami mempunyai hubungan perdata dengan anak tersebut. Seperti yang tercantum dalam KHI pasal 103 yang merubah status anak tersebut dimana sebelum diputuskan pengadilan, suami mempunyai hubungan perdata dengan anak tersebut seperti nafkah dan hubungan nasab. Dalam KHI pasal 103 dijelaskan bahwa:

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- 2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penepatan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- 3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dari persoalan tentang batas waktu suami mengingkari anak dalam kasus li'an, fuqaha berselisih pendapat mengenai masalah ini. Imam Malik mensyaratkan, apabila suami tidak mengingkari kandungan pada masa kehamilan, maka ia tidak boleh

mengingkarinya sesudah kelahiran dengan li'an.⁹ Ini bisa berarti bahwa suami yang tidak mengingkari kehamilan istrinya padahal ia tahu bahwa kehamilan itu bukan akibat pergaulannya dengan istrinya maka menurut Imam Malik, suami tidak dapat mengingkari anak yang dilahirkan istri dengan li'an.

Madzhab Hambali berpendapat untuk penolakan nasab anak dengan li'an disyaratkan dengan penolakan nasab anak dilakukan setelah masa kelahiran.¹⁰ Jika si bapak diberikan ucapan selamat dan dia diam saja maka penolakan nasab anak tidak berlaku lagi baginya.

Imam Malik dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya beralasan dengan riwayat-riwayat yang mutawatir dari hadis Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Anas r.a. dan Sahl bin Sa'ad berikut ini:

أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَيَّنَ حَكَمَ بِاللَّعَانِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنِينَ قَالَ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى صِفَةٍ كَذَا فَمَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Saw. ketika memutuskan perkara li'an di antara dua orang yang saling berli'an, beliau bersabda, jika istri melahirkan kandungan dengan ciri-ciri demikian maka aku berpendapat bahwa ia (suami benar terhadap tuduhannya)." (HR. Ibnu-Majah).¹¹

Asy-syafi'i berkata: "Apabila seorang laki-laki mengakui kehamilan istrinya, lalu istrinya melahirkan seorang anak dalam kehamilan itu, kemudian ia menafikan anak dari kehamilan itu maka tidaklah laki-laki itu menafikan anak itu dengan li'an atau selain li'an."¹² Suami yang telah mengakui anak dalam kandungan istrinya setelah anak itu lahir

⁹Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Dar al- Jil, 1989. Terjemahan Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 675

¹⁰Wahbah az-Zuhaili, *op. cit*, Hlm. 489.

¹¹Dikutip dari Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *op. cit*, hlm. 675

¹²Al-Imam asy-Syafi'i, Al-Umm, Terjemahan. Ismail Yakub, dkk., *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jakarta: C.V. Faizan, hlm. 98.

suami tidak bisa mengingkari anak tersebut berbeda jika dia telah mengingkari kehamilan istrinya maka dia bisa menolak nasab anak yang dilahirkan istri.

Asy Syafi'i berkata bahwa pengakuan itu adalah dengan lisan bukan dengan diam, maka kalau laki-laki melihat istrinya hamil lalu dia tidak mengatakan apa-apa tentang kehamilannya, kemudian istrinya melahirkan, lalu laki-laki itu menafikan anaknya maka laki-laki itu ditanya: "apakah engkau mengakui kehamilannya?" Dan jika laki-laki itu berkata tidak atau berkata tidak mengetahui kehamilannya maka laki-laki itu boleh berli'an dan menafikan anak kalau dia ingin. Dan kalau laki-laki itu berkata: "Benar, saya mengakui kehamilannya atau berkata barangkali anak itu meninggal lalu kematian itu tersembunyi (tidak jelas) kepada wanita dan saya." Maka anak itu lazim kepadanya dan tidak boleh baginya menafikannya.¹³

Jika si suami mengklaim bahwa dia tidak mengetahui kelahiran, maka jika dia berada di tempat yang dekat dengan istri seperti di rumah, atau di toko maka ucapannya tidak dapat diterima yaitu penolakan anak atas dasar tidak tahu tidak dapat diterima karena dia mengklaim perkara yang bertentangan dengan zahir. Suami dilazimkan menolak anak yang dilahirkan istrinya dan dia mengetahui bahwa itu bukan anaknya. Yaitu karena suami menyeturubuhinya atau si istri melahirkan anak kurang dari masa enam bulan sejak terjadinya persetubuhan atau lebih dari empat tahun. Jika dia dilahirkan pada masa antara enam bulan dari semenjak terjadinya persetubuhan dan empat tahun dari semenjak terjadinya persetubuhan lalu setelah terjadinya persetubuhan istri tidak dibebaskan dengan satu kali haid maka suami diharamkan menolak nasab anak.¹⁴

¹³*Ibid*, hlm. 99

¹⁴Abdul Hayyie al-Kattani, *op. cit*, hlm. 492

Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh mengingkari anak sampai istri melahirkan.¹⁵ Menurut Abu Hanifah kandungan itu belum jelas apakah bayi dalam kandungan itu bisa terlahir hidup dan bisa saja kandungan itu keguguran. Abu Hanifah membolehkan suami berli'an sekalipun tidak mengingkari kandungan.¹⁶ Murid Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa penolakan anak itu dihitung sesuai dengan hitungan masa nifas yang paling banyak, yaitu empat puluh hari.¹⁷

Dari penjelasan fuqaha tersebut dapat diketahui bahwa pengingkaran anak dilakukan secepatnya sejak kehamilan sampai kelahiran. dengan mengakuinya sekejap saja maka penafikan anak tidak akan bisa terjadi. Alasan pengingkaran anak sejak dalam kandungan yaitu karena syara' telah menggantungkan berbagai macam hukum terhadap timbulnya kandungan seperti nafkah, iddah dan larangan menyetubuhi.

Ada sebuah hadist yang tidak mensahkan pengingkaran anak setelah ia mengakuinya yaitu:

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ, وَهُوَ حَسَنٌ مُوقُوفٌ.¹⁸

Artinya: “Dan dari Umar Radhiyallahu Anhu berkata, ”Barangsiapa yang mengakui anaknya sekejap mata, maka diapun tidak berhak mengingkarinya.”(HR. Al-Baihaqi dan ini hadis hasan yang mauqut atau disandarkan pada sahabat Nabi)

Hadist ini sebagai dalil bahwa tidak sah mengingkari anak setelah mengakuinya dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Sementara itu Abu Thalib berpendapat bahwa suami berhak mengingkari anak itu sewaktu-waktu dia tahu, karena tidak boleh memberi

¹⁵ Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *op.cit*, hlm. 675

¹⁶ *Ibid*, hlm. 676

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 490.

¹⁸ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Terjemahan. Ali Nur Medan, dkk., *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013, hlm. 95

opsi tanpa dasar mengetahui. Jika suami bersikap diam pada waktu mengetahuinya maka itu wajib sebagai anaknya dan tidak boleh mengingkarinya.¹⁹

Dari pendapat para fuqaha tersebut di atas tidak satupun yang sama dengan pasal 102 KHI yang menjelaskan batas waktu suami mengingkari anak dalam kasus li'an, namun menurut penulis tidaklah sepenuhnya pasal 102 KHI itu tidak sama dengan hukum Islam karena jika dilihat bahwa batas waktu suami mengingkari anak sejak bayi lahir diberi batasan 180 hari dan setelah perceraian itu 360 hari, batasan hari tersebut dimana anak yang lahir dalam perkawinan disebut anak sah bila anak tersebut lahir 180 hari setelah perkawinan dan anak sah yang lahir sesudah putusnya perkawinan diberi waktu 360 hari untuk disebut anak sah. Dimana suami berhak mengingkari anak yang lahir dari istrinya.

Kesimpulan penulis dalam analisa ini yaitu penulis menemukan bahwa pasal 102 KHI tidaklah dapat menunjukkan batasan waktu suami mengingkari anak, karena rumusan pasal 102 KHI tidaklah sesuai dengan pendapat-pendapat fuqaha atau Imam Madzab yang dianut umat Islam di Indonesia dan rumusan pasal 102 KHI juga berbeda dengan hukum perdata Indonesia yang digunakan untuk umat selain Islam di Indonesia yaitu berbeda dengan KUH Perdata pasal 256 yang menerangkan tentang batas waktu suami mengingkari anak.

Karena KHI terkodifikasi oleh hukum Islam, maka sudah seharusnya KHI mengatur tentang batasan waktu suami mengingkari anak seperti yang hukum Islam terangkan, dimana setiap persoalan harus dikembalikan pada al-Qur'an dan hadist. Yang mana menurut fuqaha bahwa batasan waktu suami mengingkari anak saat istri mengandung atau mengingkari anak segera setelah anak itu lahir.

¹⁹*Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Li'an* adalah tuduhan suami bahwa istrinya berbuat zina dengan orang lain atau pengingkaran suami terhadap kehamilan istrinya sebagai buah pergaulan dengan istrinya itu. Batas waktu suami mengingkari anak diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 102 yaitu:

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Pengingkaran yang dilakukan sesudah waktu lampau tersebut tidak dapat diterima.

Dari rumusan pasal 102 tersebut penulis menyimpulkan bahwa pasal 102 tidaklah member keterangan yang jelas terhadap batas waktu suami mengingkari anak dan dapat dikatakan bahwa batasan waktu pengingkaran anak yang diatur dalam pasal 102 KHI tidak menunjukkan adanya batasan waktu suami dalam mengajukan gugatan pengingkaran anak.

2. Sedangkan batas waktu suami mengingkari anak menurut pendapat fuqaha berbeda dengan apa yang ada di KHI. Menurut Imam Maliki suami harus mengingkari kandungan istrinya untuk dapat melakukan *li'an*. Imam Syafi'I juga sependapat dengan Imam Malik, berbeda

dengan pendapat Imam Hanafi mengatakan bahwa mengingkari anak dapat dilakukan saat istri melahirkan anak tersebut. Pasal 102 KHI belum sesuai dengan hukum Islam, pasal tersebut belum dapat memperlihatkan akibat hukum dengan diaturnya batas waktu suami mengingkari anak dengan waktu yang cukup lama yaitu waktu 6 bulan sejak kelahiran anak dan waktu 360 hari setelah terjadinya perceraian. Sehingga pasal ini belum cukup sebagai pedoman hukum dalam kompilasi hukum Islam karena pasal ini bertolak belakang dengan hukum-hukum fiqh, dan sudah dijelaskan dalam bab III penulis bahwa berdirinya kompilasi hukum Islam digunakan sebagai pedoman umat Islam dan rumusan masalahnya diambil dari berbagai kitab kuning yang perlu ketelitian dalam memahaminya.

B. Saran-Saran

1. Karena apa yang menjadi ketentuan di dalam pasal 102 KHI belum cukup sebagai pedoman hukum dalam kompilasi hukum Islam maka ketentuan tersebut hendaknya ada pembaharuan lagi sesuai dengan perubahan zaman. Karena kompilasi hukum Islam digunakan sebagai pedoman umat Islam dan rumusan masalahnya diambil dari berbagai kitab kuning dan semua permasalahan dikembalikan pada al-Qur'an dan hadist.
2. Apa yang menjadi ketentuan KHI pasal 102 tetaplah dilakukan karena telah menjadi landasan dalam mengajukan gugatan pengingkaran anak yang selama ini telah terjadi dalam pengadilan. Mengingat banyaknya

persoalan suami istri yang terkadang dipenuhi dengan ketidaktauan tentang hukum-hukum yang terjadi dalam perkawinan.

C. Penutup

Demikianlah skripsi yang telah penulis susun, besar harapan penulis untuk dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Tidak lupa pula penulis selalu mengharap saran dan kritik dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi yang telah penulis susun, dan juga dapat menambah khazanah pengetahuan bagi pribadi penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, juga segalanya dikembalikan, karena hanya Dia tempat kebenaran sejati, dan berkat pertolongan serta dengan petunjuk-Nya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, Ed. Pertama, 1992.
- Abidin, Slamet dan Aminuddi, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al Barry, Zakaria Ahmad, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, Terjemahan. Nasution, Chadidjah, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Al-Imam asy-Syafi'i, Al-Umm, Terjemahan. Ismail Yakub, dkk., *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jakarta: C.V. Faizan,
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin ismail al-Amir, *Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Terjemahan. Nur Medan, Ali, dkk., *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islami wa Aulatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 2007, Terjemahan. Al-Kattani, Abdul Hayyie, dkk, *Fiqh Islam 10*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, cetakan ke 2, Jakarta, 1984-1985.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ardi Ofset, 1990.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Cet X*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- ibn Rusyd, al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Beirut: Dar al-Jiil, 1989. Terjemahan Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Kemenag RI, *Al Qur'an dan Tarjamahannya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2012.
- M. Kompas.com/bola/read/2008/03/13/14273697/Rahma.Azhari.Resmi.Menjanda.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

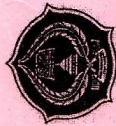
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *al Jami’ fii Fiqhi an-Nisa’*, Terjemahan M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Muhammad, Bahrudin, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nuansa Aulia, Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008.
- Rahman, Musthofa, *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Atmaja, 2003.
- Rifa’, Moh., dkk., *Terjemah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 8*, Terjemahan. Moh Thalib, *Fiqh Sunnah 8*, Bandung: PT al Ma’arif, 1983.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan. Moh Thalib, *Fikih Sunnah*, Bandung: al Ma’arif, 1983.
- Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin, *Fiqhus Sunnah Lin Nisaa’*, Darul Bayan al-Haditsah, Terjemahan. Sobari, Asep, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007.
- Shabir, Muslich, Terjemahan., *al-Lu’Lu’ Wal Marjan*, Semarang: Al-Ridha, 1993.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet II, 1998.
- Syaikh Kamil Muhammd Muhammad ‘Uwaidah, *Al Jami’ fii Fiqhi an-Nisa’*, Terjemahan M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Tjitrosudibio, Subekti dan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

SERTIFIKAT

Nomor : In.06.2/D/PP.00.9/1211b/2010

Diberikan kepada:

NAMA : MUJIB ALI MAHFIROH

NIP/NIM : 102111051

Telah mengikuti kegiatan Studium General Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Semester Gasal Tahun Akademik 2010-2011
Orasi ilmiah oleh Dr. H. Ali Imron, M.Ag. dengan judul:

"Status Hukum dan Problematika Nikah Sirri di Indonesia"


Pada tanggal 1 September 2010 sebagai:

P E R S E R T A

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Semarang, 1 September 2010

Dekan,



Dr. H. Muhyiddin, M.Ag. 
NIP. 19550228 198303 1 003

FAKULTAS
HUKUM
JURUSAN
HUKUM
PUBLIK



IAIN WALISONGO

PIAGAM

Nomor : In. 06.0/R/PP.00.9/2886/2010

Diberikan kepada :

NUR AINI MAGHIROH.

atas partisipasinya pada Studium General dalam rangka Kuliah Umum Semester Gasal Tahun Akademik 2010/2011 dengan tema "Format Dakwah Masa Depan" yang diselenggarakan oleh IAIN Walisongo pada tanggal 30 Agustus 2010 sebagai:

PESERTA

Semarang, 30 Agustus 2010



Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA^{Dr}
NIP. 19570414 198203 1003



Panitia Pelaksana
Masa Penerinaan Anggota Baru (MAPABA)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
"The Indonesian Moslem Student Movement"
Rayon Syari'ah Komisariat Walisongo Semarang

Sekretariat : YPMI B. Honggowongso No. 6. Ringinwatu, Ngaliyan Semarang Hp 081501491989 (Am) 085641704537 (Ab)

SERTIFIKAT

NOV 08 10 PM MAPABA XXVIII 501 02-004 512 10 2010
Diberikan kepada:

Nur Anni Maghfiroh

Atas partisipasinya dalam acara:
Masa Penerinaan Anggota Baru (MAPABA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah Komisariat Walisongo Semarang,
tanggal 15-17 Oktober 2010 di Pon-Pes Al Mustofa Desa Pandes, Kec. Cepiring, Kab. Kendal

Sebagai:

PESERTA

Semarang, 15 Oktober 2010

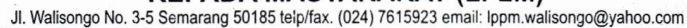
Panitia Pelaksana

Masa Penerinaan Anggota Baru (MAPABA)
PMII Rayon Syari'ah Kom. Walisongo




M. Anif Fauzi
Ketua Umum

M. Fuadi
Sekretaris



Nomor : In.06.0/L1/PP.06/351/2014

 *[Signature]*
Solihan, M. Ag.
0604 199403 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur 'Aini Magfiroh
Nim : 102111051
Fakultas : Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ tanggal lahir : Rembang, 02 September 1992
Agama : Islam
Alamat : dk. Tulis, Ds. Selopuro, Kec. Lasem, Kab. Rembang

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Riwayat Pendidikan

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Tamat Tk. Marsudi Ilmu | Lulus Tahun 1998 |
| 2. Tamat MI an-Nasriyyah | Lulus Tahun 2004 |
| 3. Tamat MTS N Lasem | Lulus Tahun 2007 |
| 4. Tamat MAN Lasem Kudus | Lulus Tahun 2010 |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Januari 2015

Nur Aini Magfiroh
NIM 102111051

BIODATA DIRI

Nama lengkap : Nur Aini Magfiroh
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 02 September 1992
NIM : 102111051
Jurusan : Ahwaal Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Nama orang tua

Bapak : Masrukin
Ibu : Lasmitah
Alamat : dk. Tulis, Ds. Selopuro, Kec. Lasem, Kab. Rembang

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Desember 2014

Nur Aini Magfiroh
NIM 102111051